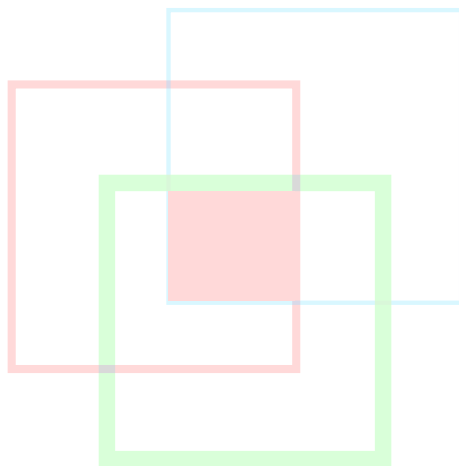


Organisasi
Perburuhan
Internasional

Program ILO di Indonesia: Capaian 2013



International
Labour
Organization



Program ILO di Indonesia: **Capaian 2013**

Copyright © International Labour Organization 2014
Cetakan Pertama 2014

Publikasi-publikasi International Labour Organization memperoleh hak cipta yang dilindung oleh Protokol 2 Konvensi Hak Cipta Universal. Meskipun demikian, kutipan-kutipan singkat dari publikasi tersebut dapat diproduksi ulang tanpa izin, selama terdapat keterangan mengenai sumbernya. Permohonan mengenai hak reproduksi atau penerjemahan dapat diajukan ke ILO Publications (Rights and Permissions), Kantor Perburuhan Internasional, CH-1211 Geneva 22, Switzerland, or by email: pubdroit@ilo.org. International Labour Organization menyambut baik permohonan-permohonan seperti itu.

Perpustakaan, lembaga dan pengguna lain yang terdaftar di Inggris Raya dengan Copyright Licensing Agency, 90 Tottenham Court Road, London W1T 4LP [Fax: (+44) (0)20 7631 5500; email: cla@cla.co.uk], di Amerika Serikat dengan Copyright Clearance Center, 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923 [Fax: (+1) (978) 750 4470; email: info@copyright.com] atau di negara-negara lain dengan Reproduction Rights Organizations terkait, dapat membuat fotokopi sejalan dengan lisensi yang diberikan kepada mereka untuk tujuan ini.

Program ILO di Indonesia: Capaian 2013/International Labour Organization, Kantor Jakarta; ILO, 2014
76 p.

ISBN: 978-92-2-028567-1 (print)
978-92-2-128568-7 (web pdf)

Juga tersedia dalam Bahasa Inggris: *ILO Works in Indonesia: 2013 Results*; ISBN: 978-92-2-028567-1 (print); 978-92-2-128568-7 (web pdf)/International Labour Organization - Jakarta: ILO, 2014

ILO Katalog dalam terbitan

Penggambaran-penggambaran yang terdapat dalam publikasi-publikasi ILO, yang sesuai dengan praktik-praktik Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan presentasi materi yang ada di dalamnya tidak mewakili pengekspresian opini apapun dari sisi Kantor Perburuhan Internasional mengenai status hukum negara, wilayah atau teritori manapun atau otoritasnya, atau mengenai batas-batas negara tersebut.

Tanggung jawab atas opini-opini yang diekspresikan dalam artikel, studi, dan kontribusi lain yang ditandatangani merupakan tanggung jawab penulis, dan publikasi tidak mengandung suatu dukungan dari Kantor Perburuhan Internasional atas opini-opini yang terdapat di dalamnya.

Rujukan ke nama perusahaan dan produk komersil dan proses tidak menunjukkan dukungan dari Kantor Perburuhan Internasional, dan kegagalan untuk menyebutkan suatu perusahaan, produk komersil atau proses tertentu bukan merupakan tanda ketidaksetujuan.

Publikasi ILO dapat diperoleh melalui penjual buku besar atau kantor lokal ILO di berbagai negara, atau secara langsung dari ILO Publications, International Labour Office, CH-1211 Geneva 22, Switzerland; atau Kantor ILO Jakarta, Menara Thamrin, Lantai 22, Jl. M.H. Thamrin Kav. 3, Jakarta 10250, Indonesia. Katalog atau daftar publikasi tersedia secara cuma-cuma dari alamat di atas, atau melalui email: pubvente@ilo.org

Kunjungi halaman web kami: www.ilo.org/publns

Foto-foto: Koleksi Kantor ILO Jakarta
Peyunting: Gita F. Lingga

Dicetak di Indonesia

Kata Pengantar



Merupakan kebanggaan kami dapat menghadirkan ‘laporan capaian tahunan’ kedua yang memaparkan kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di Indonesia. Publikasi ini mencakup capaian-capaian di tahun 2013. Prakarsa tahun lalu untuk menerbitkan laporan capaian tahunan mendapat sambutan baik di Indonesia dan di luar negeri sebagai sebuah tinjauan singkat mengenai apa yang telah dicapai.

Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) merupakan badan tripartit Persatuan Bangsa-Bangsa yang memiliki mandat untuk mempromosikan pekerjaan yang layak untuk semua. Anggota-anggota kami adalah pemerintah dari lebih dari 180 negara serta perwakilan pekerja dan pengusaha mereka. Indonesia adalah anggota aktif ILO, sejak bertahun lamanya. Hasil yang telah dicapai cukup mengagumkan, termasuk ratifikasi dari kesemua konvensi pokok ILO yang mencakup menentang pekerja anak, menolak diskriminasi, menolak kerja paksa dan kebebasan berserikat. Indonesia pun terus berbagi pengalaman dan keahliannya dengan negara-negara lain seperti terlihat dalam keberhasilannya mengurangi pekerja anak.

Program nasional kami untuk Indonesia (2012-2015) berdasarkan Pakta Lapangan Kerja Indonesia dan terfokus pada:

1. Penciptaan lapangan kerja;
2. Hubungan industrial; dan
3. Perlindungan sosial.

Informasi detil mengenai capaian-capaian tahun 2013 tertuang di halaman-halaman berikut ini.

Capaian-capaian tahun 2013 ini berdasarkan kemitraan dengan para konstituen kami, Pemerintah Indonesia, organisasi pekerja dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) atas nama pengusaha. Kami terus menjalin kerjasama dengan mereka pada 2014.

Saya ingin menyampaikan penghargaan kami atas dukungan donor dari berbagai donor, yang tanpa mereka kami tidak akan mungkin melakukan pekerjaan kami. Juga penghargaan kepada tim kolega ILO di Indonesia atas kinerja dan capaian mereka, bekerja sama dengan para mitra serta kolega ILO lainnya.

Kami menyambut baik masukan atas pekerjaan yang kami lakukan serta saran untuk laporan capaian kami berikutnya pada 2014. Untuk informasi mengenai program nasional kami serta berbagai publikasi proyek lainnya, saya mengundang anda untuk melihatnya melalui www.ilo.org/jakarta

Selamat membaca!



Peter van Rooij
Direktur ILO Jakarta

Pekerjaan Layak untuk Semua

Pekerjaan merupakan hal penting untuk kesejahteraan manusia. Di samping memberikan penghasilan, pekerjaan juga membuka jalan menuju perbaikan ekonomi dan sosial yang lebih luas, yang pada gilirannya memperkuat individu, keluarga dan masyarakat. Namun kemajuan ini bergantung pada pekerjaan yang bersifat layak. Pekerjaan layak merupakan rangkuman dari berbagai aspirasi masyarakat dalam kehidupan pekerjaan mereka. Ia melibatkan peluang untuk memperoleh pekerjaan yang produktif dan memperoleh penghasilan yang adil, keamanan di tempat kerja dan perlindungan sosial untuk keluarga mereka.

Pekerjaan layak berarti prospek yang lebih baik untuk pengembangan pribadi dan integrasi sosial, serta kebebasan masyarakat dalam menyampaikan kekhawatiran mereka, berorganisasi dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Ini membutuhkan adanya kesetaraan peluang dan perlakuan bagi semua perempuan dan laki-laki. Pekerjaan layak pun merupakan kunci untuk mengentaskan kemiskinan. Karenanya, penciptaan pekerjaan layak harus dimasukkan dalam kebijakan pembangunan.

Daftar Isi

	Kata Pengantar	3
	Daftar Isi	5
	Sekilas Indonesia	9
	A. Penciptaan lapangan kerja untuk pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan	12
	1. Kebijakan ketenagakerjaan	
	♦ Memantau dan Menilai Kemajuan Pekerjaan Layak (MAP)	13
	♦ Mengkaji dan Menanggulangi Dampak Perdagangan terhadap Ketenagakerjaan (ETE)	14
	2. Ketenagakerjaan Muda	16
	3. Pengoptimalan ketenagakerjaan dalam investasi masyarakat	
	♦ Akses ke Mata Pencarian Hijau untuk Respons Lingkungan yang Inklusif di Kalimantan Tengah terhadap Perubahan Iklim (GLACIER)	19
	♦ Pekerjaan Layak untuk Ketahanan Pangan	22
	4. Pengembangan kewirausahaan dan bisnis	
	♦ Program Kesenambungan Daya Saing dan Tanggung Jawab Perusahaan (SCORE)	24
	♦ Mendorong Usaha Mikro dan Kecil Melalui Peningkatan Akses Pengusaha ke Layanan Keuangan dan Usaha Ramah Lingkungan (PROMISE IMPACTS)	27
	♦ Program Peningkatan Daya Saing Usaha Kecil ASEAN	30
	♦ Program Pembangunan berbasis Masyarakat (PcDP) Tahap II: Pelembagaan Pembangunan Mata Pencarian yang Berkelanjutan untuk Masyarakat Papua	32
	♦ Program Pemulihan Mata Pencarian di Kepulauan Mentawai - Tahap II	36
	♦ Program Kewirausahaan Berwawasan Lingkungan Indonesia	40
	B. Hubungan industrial yang baik dalam konteks tata kelola ketenagakerjaan yang efektif	42
	♦ Better Work Indonesia	43
	C. Perlindungan sosial untuk semua	
	1. Mendukung Pelaksanaan "Layanan Satu Atap" dalam Strategi Perlindungan Sosial di Provinsi Jawa Timur dan Maluku	49
	2. Mempromosikan Hak dan Peluang bagi Penyandang Disabilitas dalam Pekerjaan melalui Peraturan Perundangan (PROPEL-Indonesia)	52
	3. Mempromosikan Hak-hak Penyandang Disabilitas di Indonesia (UNPRPD)	55
	4. Program Pekerja Anak	57
	5. Program HIV dan AIDS di Tempat Kerja	61
	6. Aksi Tripartit untuk Melindungi dan Mempromosikan Hak Pekerja Migran di Kawasan ASEAN (Proyek ASEAN Triangle)	64
	Tema lintas sektor	
	1. Kesenjangan Gender	
	♦ Akses terhadap Pekerjaan dan Pekerjaan Layak Bagi Perempuan (MAMPU)	67
	♦ Program Pengarusutamaan Gender	71

Bagaimana ILO Bekerja

Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO adalah badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang terus berupaya mendorong terciptanya peluang bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif secara bebas, adil, aman dan bermartabat. Tujuan utama ILO adalah mempromosikan hak-hak di tempat kerja, mendorong terciptanya peluang kerja yang layak, meningkatkan perlindungan sosial serta memperkuat dialog untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan dunia kerja.

Organisasi ini memiliki 185 negara anggota dan bersifat unik di antara badan-badan PBB lainnya karena struktur tripartit yang dimilikinya menempatkan pemerintah, organisasi pengusaha dan serikat pekerja/buruh pada posisi yang setara dalam menentukan program dan proses pengambilan kebijakan. Dalam mengundang pemerintah, pengusaha dan pekerja untuk bersama-sama menyusun peraturan tenaga kerja, mengawasi pelaksanaannya, meningkatkan kesadaran, serta menyusun kebijakan serta merencanakan program, ILO ingin memastikan bahwa upaya-upayanya ini didasari pada kebutuhan para perempuan dan laki-laki yang bekerja.

ILO bekerja berdasarkan pedoman dari Badan Pemimpin ILO (Governing Body), yang terdiri dari 28 wakil pemerintahan, 14 wakil pekerja/buruh dan 14 wakil pengusaha. Mereka bertugas mengambil keputusan mengenai tindakan yang akan mempengaruhi kebijakan ILO, mempersiapkan rancangan program dan anggaran, yang kemudian diserahkan kepada Konferensi Ketenagakerjaan Internasional (ILC) untuk disetujui, serta memilih Direktur Jenderal.

ILC mengadakan pertemuan setiap bulan Juni tiap tahunnya di Jenewa. Para delegasi didampingi oleh para penasihat teknis. Setiap negara anggota, termasuk Indonesia, memiliki hak untuk mengirimkan empat delegasi ke ILC – dua dari pemerintah dan masing-masing satu mewakili pekerja dan pengusaha. Mereka dapat mengemukakan pendapat dan melakukan pemungutan suara secara mandiri.

ILO di Indonesia: Prioritas dan Keluaran

Indonesia dan ILO telah menjalin kerja sama sejak Indonesia menjadi anggota ILO pada 12 Juni 1950. Menerapkan struktur tripartit yang unik, ILO membangun kerja sama dengan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan tiga konfederasi serikat pekerja: Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) serta Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Berdasarkan prioritas-prioritas Pemerintah Indonesia, mandat ILO dan fokus para konstituen tripartit, tiga bidang prioritas telah ditetapkan untuk Program Pekerjaan Layak Nasional untuk Indonesia 2012-2015:

A. Penciptaan lapangan kerja untuk pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan

1. Pengarusutamaan ketenagakerjaan dalam kebijakan ekonomi makro, tenaga kerja dan sosial melalui perangkat dan analisis pasar tenaga kerja yang baik.
2. Peningkatan kebijakan dan program untuk lebih melengkapi perempuan dan laki-laki muda memasuki dunia kerja.
3. Pengoptimalan hasil-hasil lapangan kerja dari investasi publik dan masyarakat.
4. Peningkatan kebijakan dan program pengembangan kewirausahaan, bisnis dan koperasi untuk menciptakan lapangan kerja termasuk inklusi keuangan.
5. Keterampilan tenaga kerja ditingkatkan melalui pelatihan berbasis permintaan dan kompetensi untuk lebih memenuhi keperluan pasar tenaga kerja.

B. Hubungan industrial yang baik dalam konteks tata kelola ketenagakerjaan yang efektif

1. Administrasi ketenagakerjaan menyediakan pelayanan yang efektif untuk meningkatkan kondisi dan lingkungan kerja.
2. Konstituen tripartit terlibat secara efektif dalam dialog sosial untuk mengaplikasikan peraturan dan standar ketenagakerjaan internasional.
3. Penguatan kapasitas kelembagaan dari organisasi pengusaha dan pekerja untuk memberikan kontribusi menyuarakan hubungan industrial menurut mandat dan tanggung jawab mereka masing-masing.

C. Jaminan sosial untuk semua

1. Pemerintah dan mitra sosial memiliki kapasitas yang lebih besar dalam merancang dan menerapkan kebijakan dan program jaminan sosial.
2. Hambatan terhadap lapangan kerja dan pekerjaan layak dapat diatasi, khususnya kesenjangan gender dan penyandang disabilitas.
3. Penerapan efektif dari Rencana Aksi Nasional untuk Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.
4. Meningkatkan kerangka kebijakan, kelembagaan dan penerapan program untuk pemberdayaan dan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia dan pekerja rumah tangga.
5. Kebijakan dan program terpadu HIV bagi pekerja perempuan dan laki-laki.

Tema lintas sektor

Kesetaraan gender, tripartisme dan dialog sosial serta standar-standar ketenagakerjaan internasional diarusutamakan melalui prioritas-prioritas DWCP.



Sekilas Indonesia



176.662

Penduduk yang bekerja (dalam 000)

118.192

Penduduk aktif secara ekonomi (dalam 000)

110.804

Total ketenagakerjaan (dalam 000)

7.388

Total pengangguran (dalam 000)

74.335

Total pekerja mandiri (dalam 000)

Statistik Utama (2013)

66,9%

Tingkat partisipasi angkatan kerja

62,7%

Rasio tenaga kerja atas penduduk

6,25%

Tingkat pengangguran

33,7%

Jumlah pekerja mandiri dalam ketenagakerjaan

4,2%

Rasio pengangguran atas penduduk

9,8%

Tingkat setengah pengangguran

33,1%

Tingkat ketidakaktifan

Sumber Badan Pusat Statistik

PROYEK:

YOUTH	Ketenagakerjaan Muda	MENTAWAI LIVELIHOODS	Program Pemulihan Mata Pencarian di Kepulauan Mentawai
PROMISE IMPACTS	Mendorong Usaha Mikro dan Kecil Melalui Peningkatan Akses Pengusaha ke Layanan Keuangan dan Usaha Ramah Lingkungan (PROMISE IMPACTS)	CHILD LABOUR	Program Pekerja Anak
MAMPU	Akses terhadap Pekerjaan dan Pekerjaan Layak bagi Perempuan (MAMPU)	ETE	Mengkaji dan Menanggulangi Dampak Perdagangan terhadap Ketenagakerjaan (ETE)
ASEAN SBCP	Program Peningkatan Daya Saing Usaha Kecil di Asia Tenggara	PROPEL	Mempromosikan Hak dan Peluang bagi Penyandang Disabilitas dalam Pekerjaan melalui Peraturan Perundangan (PROPEL-Indonesia)
PcDP	Fase II Program Pembangunan Berbasis Masyarakat (PcDP) Pelembagaan Pembangunan Mata Pencarian yang Berkelanjutan untuk Masyarakat Papua	GLACIER	Akses ke Mata Pencarian Hijau untuk Respons Lingkungan yang Inklusif di Kalimantan Tengah terhadap Perubahan Iklim (GLACIER)
SCORE	Program Kesenambungan Daya Saing dan Tanggung Jawab Perusahaan (SCORE)	MAP	Pemantauan dan Penilaian Kemajuan Pekerjaan Layak (MAP)
BWI	Better Work Indonesia	ASEAN TRIANGLE	Aksi Tripartit ILO untuk melindungi Pekerja Migran di Kawasan ASEAN (Proyek Triangle, Indonesia)
UNPRPD	Mempromosikan Hak-hak Penyandang Disabilitas di Indonesia (UNPRPD)	SWS	Mendukung Pelaksanaan "Layanan Satu Atap" dalam Strategi Perlindungan Sosial di Provinsi Jawa Timur dan Maluku
		GMP	Program Pengarusutamaan Gender

PROGRAM:

HIV	Program HIV dan AIDS di Tempat Kerja	DWFS	Pekerjaan Layak untuk Ketahanan Pangan
IGEP	Program Kewirausahaan Berwawasan Lingkungan Indonesia		

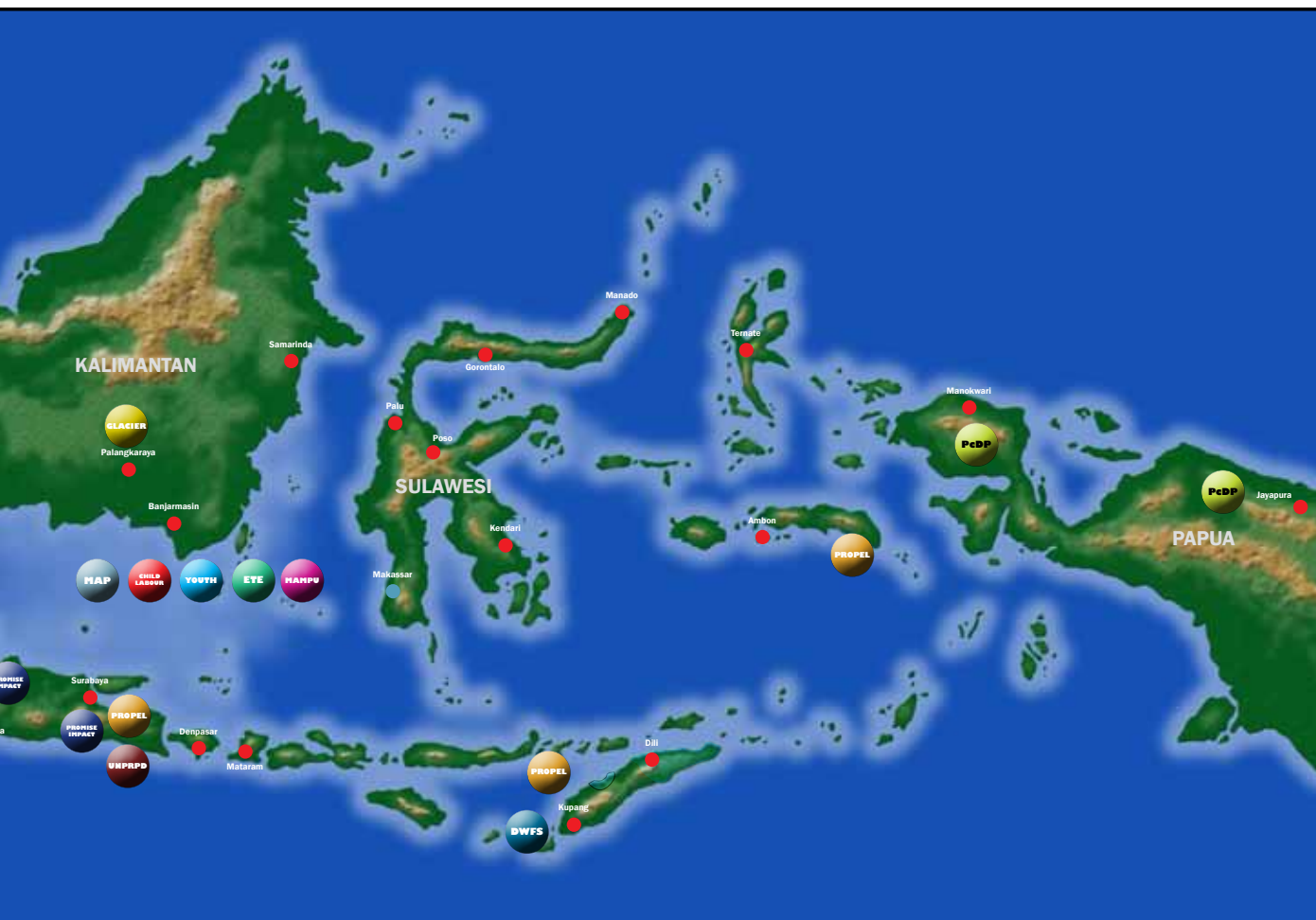
Kegiatan



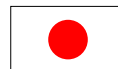
Didukung oleh:



ILO di Indonesia



**International
Finance Corporation**
World Bank Group



Komisi Eropa



Norad



Sida





A. Penciptaan lapangan kerja untuk pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan

1. Pengarusutamaan ketenagakerjaan dalam kebijakan ekonomi makro, tenaga kerja dan sosial melalui perangkat dan analisis pasar tenaga kerja yang baik.
2. Peningkatan kebijakan dan program untuk lebih melengkapi perempuan dan laki-laki muda memasuki dunia kerja.
3. Pengoptimalan hasil-hasil lapangan kerja dari investasi publik dan masyarakat.
4. Peningkatan kebijakan dan program pengembangan kewirausahaan, bisnis dan koperasi untuk menciptakan lapangan kerja termasuk inklusi keuangan.
5. Keterampilan tenaga kerja ditingkatkan melalui pelatihan berbasis permintaan dan kompetensi untuk lebih memenuhi keperluan pasar tenaga kerja.

Pemantauan dan Penilaian Kemajuan Pekerjaan Layak (MAP)



Sekilas:

Didanai oleh Uni Eropa, Proyek ILO-MAP dilaksanakan oleh ILO bekerja sama dengan pemerintah Indonesia serta mitra-mitra sosial lainnya. Bersama dengan badan pemerintah, serikat pekerja dan organisasi pengusaha serta lembaga penelitian, proyek ini memperkuat kapasitas para mitra untuk melakukan pemantauan dan penilaian terhadap kemajuan proyek pekerjaan layak secara mandiri. Pada 2013 proyek ILO-MAP memberikan perhatian khusus dalam pengembangan profil pekerjaan layak untuk Provinsi Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Maluku, serta saling berbagi informasi mengenai pengetahuan dan pelajaran yang telah diperoleh.

Didukung oleh:



Komisi Eropa

Capaian Tahun 2013:

1. **Penyelesaian profil pekerjaan layak untuk tiga provinsi, yakni Jawa Timur, NTT dan Maluku.** Profil-profil tersebut berisi informasi mengenai kemajuan yang telah dicapai berkaitan dengan pekerjaan layak di ketiga provinsi tersebut selama tahun 1996-2010, serta mengidentifikasi tantangan serta kesempatan dalam mendukung kemajuan menuju Agenda Pekerjaan yang Layak (DWA). Profil-profil tersebut mencakup sejumlah indikator seperti tingkat pertumbuhan lapangan kerja, pekerjaan sektor formal, upah, perlindungan sosial terhadap pekerja anak serta besarnya keterlibatan serikat pekerja.
2. **Pengembangan kapasitas pemangku kepentingan** terkait untuk menyediakan rekomendasi-rekomendasi mengenai pemantauan dan penilaian kemajuan menuju pekerjaan yang layak di masa mendatang melalui partisipasi mereka dalam seminar global MAP di Brussel.

Mengkaji dan Menanggulangi Dampak Perdagangan terhadap Ketenagakerjaan (ETE)



Sekilas:

Deklarasi ILO mengenai Keadilan Sosial untuk Globalisasi yang Adil diadopsi pada Juni 2008 merupakan respons terhadap kekhawatiran global mengenai dampak liberalisasi perdagangan dan hubungan perubahan struktural yang dihasilkan terhadap ekonomi dan pasar tenaga kerja. Dengan pendanaan dari Uni Eropa, proyek ini bertujuan untuk mendukung analisa kebijakan perdagangan dan pasar tenaga kerja yang efektif dan koheren untuk mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi para pekerja dan perusahaan, serta untuk memperluas kesempatan pembentukan lapangan kerja yang layak di Indonesia. Tahun ini, proyek tersebut difokuskan untuk melakukan konsolidasi dan berbagi produk pengetahuan dengan para konstituen untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam dialog-dialog kebijakan.

Didukung oleh:



Komisi Eropa

Capaian Tahun 2013:

1. **Finalisasi dan peluncuran publikasi berjudul “Perdagangan dan Ketenagakerjaan: Laporan untuk Indonesia”** serta “Analisis Simulasi Social Accounting Matrix (SAM) dan Model SMART”.
2. **Pelaksanaan pertemuan “Kelompok Kerja Kebijakan mengenai Perdagangan dan Ketenagakerjaan”**, yang memfokuskan pada dukungan yang koheren terhadap dialog kebijakan dan reformasi regulasi mengenai perdagangan dan pasar tenaga kerja untuk meningkatkan ketenagakerjaan di Indonesia dan luar negeri.

Menelaah Dampak Perdagangan terhadap Ketenagakerjaan di Indonesia

Reformasi dan keterbukaan perdagangan berdampak signifikan terhadap ketenagakerjaan, terutama di negara-negara berkembang. Karena ekonomi Indonesia semakin lama semakin bergantung pada perdagangan, dampak perdagangan di ketenagakerjaan Indonesia tak hanya telah menjadi subyek yang besar namun juga menjadi perhatian utama bagi negara.

Untuk lebih mendalami permasalahan terkait perdagangan dan ketenagakerjaan,

ILO meluncurkan publikasi baru berjudul “Perdagangan dan Ketenagakerjaan: Laporan untuk Indonesia” pada Juli 2013 di Jakarta. Peluncuran tersebut dilaksanakan oleh ILO melalui proyek “Mengkaji dan Menanggulangi Dampak Perdagangan terhadap Ketenagakerjaan (ETE)”, yang didanai oleh Uni Eropa.

Laporan tersebut menggarisbawahi hubungan antara perdagangan dan ketenagakerjaan di Indonesia untuk mencari formulasi kebijakan nasional. Laporan tersebut juga mengungkapkan berbagai studi yang dilakukan oleh proyek ILO-ETE di Indonesia dan diskusi-diskusi yang dilakukan pada pertemuan Kelompok Kerja Kebijakan ETE di Indonesia.

Selain menekankan pentingnya Indonesia untuk mengambil langkah-langkah strategis untuk mengurangi biaya penyesuaian liberalisasi perdagangan, laporan juga menegaskan pentingnya kebijakan-kebijakan tambahan untuk meningkatkan kapasitas suplai negara, yang memerlukan perbaikan signifikan dalam hal infrastruktur fisik, produktivitas buruh yang lebih tinggi serta pengaturan ekonomi yang lebih baik.

“Kami berharap bahwa temuan-temuan dalam laporan ini akan menarik perhatian, terutama para pembuat

kebijakan dan mitra sosial di Indonesia. Kami juga berharap laporan ini mampu menjadi jalan bagi adanya diskusi-diskusi yang berkontribusi terhadap reformasi kebijakan bagi pembangunan yang inklusif dan kaya lapangan kerja di Indonesia,” ujar Michiko Miyamoto, Deputy Direktur ILO di Indonesia, saat meluncurkan publikasi tersebut.

Peluncuran ini juga menandai berakhirnya Proyek ILO-ETE di Indonesia. Selama empat tahun, Proyek ini telah memberikan analisis dan dukungan terhadap penyusunan kebijakan-kebijakan perdagangan dan pasar kerja yang efektif dan terpadu guna menyikapi tantangan-tantangan yang dihadapi para pekerja dan pengusaha serta memperluas kesempatan penciptaan lapangan kerja yang layak.

Para pembicara dan pembahas dalam seminar ini mencakup, antara lain, Rahma Iryanti, Direktur Ketenagakerjaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Djuharsa, Kepala Badan Riset dan Informasi, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Said Iqbal, Presiden KSPI, Anton Supit, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Peter McCawley, pakar perdagangan dan ketenagakerjaan dari SEADI, dan Padang Wicaksono dari Universitas Indonesia. ❖



Ketenagakerjaan Muda



Sekilas:

Selama 10 tahun terakhir, Kantor ILO untuk Indonesia telah mempromosikan ketenagakerjaan muda melalui berbagai inisiatif yang terfokus pada akses atas pekerjaan yang layak, pelatihan kejuruan dan kewirausahaan, pelatihan keterampilan, dan promosi hak pekerja. ILO telah mempromosikan kondisi yang mendorong kemampuan kerja kaum muda Indonesia melalui Program Pekerjaan Layak Nasional dan melalui proyek-proyek kerjasama teknis seperti "Pelatihan Pendidikan dan Keterampilan untuk Kaum Muda" (EAST) dan "Peluang Kerja untuk Kaum Muda" (JOY) serta proyek transisi dari sekolah ke dunia kerja yang didanai oleh SIDA.

Dedikasi ILO terhadap ketenagakerjaan muda sejalan dengan kebijakan pemerintah Indonesia dalam mendorong ketenagakerjaan muda. Pemerintah telah menerapkan strategi pembangunan empat pilar yaitu pro-pertumbuhan, pro-lapangan kerja, pro-masyarakat miskin dan pro-lingkungan, sejalan dengan komitmennya dalam mencapai Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs), yang bertujuan mewujudkan lapangan kerja yang produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk kaum muda.

Didukung oleh:



Capaian Tahun 2013:

1. **Adaptasi dan pengujian pendidikan kewirausahaan dengan Kementerian Pendidikan dan Budaya.** Sebanyak 135 guru kewirausahaan di 75 sekolah menengah kejuruan (SMK) yang berlokasi di lima kabupaten di Jawa Timur telah dilatih mengenai modul kewirausahaan *Knowing about Business (KAB) Start Up and Go*. Setidaknya 10.450 pelajar SMK kelas 10 telah menerima pelatihan interaktif dan menyenangkan yang disampaikan melalui video, permainan, permainan peran dan diskusi.
2. **Penyusunan rencana aksi dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk meningkatkan pengembangan program kewirausahaan.** Sebagai hasilnya, program pelatihan untuk pelatih percontohan yang menggunakan modul ILO "Mulai dan Tingkatkan Usaha Anda" (SIYB) diselenggarakan di Yogyakarta, Solo dan Semarang. Dalam pemilihan peserta, proyek percontohan ini melibatkan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Direktorat Kewirausahaan dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dari 36 instruktur yang terpilih untuk pelatihan tersebut, 16 berasal dari Kementerian Tenaga Kerja dan dua dari Apindo.
3. **Pelatihan bagi 60 pengusaha muda mengenai memulai dan meningkatkan usaha mereka, dan memberikan pendampingan pasca pelatihan.** Para pelatih dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Apindo memilih 60 pengusaha dari lebih 200 pelamar, dan melatih mereka menggunakan modul SIYB. Setelah pelatihan, 18 pelatih melakukan empat kali pendampingan pasca pelatihan bagi tiap-tiap pengusaha guna memberikan bimbingan dan pemantauan.



Rencana Tahun 2014:

1. Melakukan lokakarya evaluasi atas pendidikan kewirausahaan di sekolah-sekolah SMK yang menggunakan modul KAB *Start Up and Go*. Berdasarkan keberhasilan modul ini di Jawa Timur, diharapkan dapat direplikasi di seluruh Indonesia oleh Kementerian Pendidikan Nasional.
2. Melakukan lokakarya evaluasi atas pelatihan kewirausahaan percontohan menggunakan modul SIYB. Berdasarkan keberhasilan modul ini di Yogyakarta, Solo dan Semarang, diharapkan dapat direplikasi di seluruh Indonesia oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.



Kerjasama ASEAN Mengatasi Pengangguran Muda

Delegasi negara-negara ASEAN bersepakat untuk menjalin kerjasama mengatasi masalah pengangguran muda. Selain merancang adanya upaya yang intensif dan terpadu untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak dan lebih baik bagi kalangan muda, mereka juga berupaya memperbaiki informasi tentang pasar tenaga kerja di kalangan muda, mempromosikan kemampuan kerja bagi kaum muda serta mendorong pengembangan kewirausahaan di negara-negara anggota ASEAN sebagai langkah penting untuk mengatasi masalah pengangguran dan ketenagakerjaan muda.

Hal tersebut mengemuka dalam pertemuan Forum ASEAN tentang Ketenagakerjaan Muda, yang diselenggarakan pada 13 Mei 2013 oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) di Semarang, Jawa Tengah, dengan dukungan ILO dan Sekretariat ASEAN. Forum ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan Kelompok Kerja ASEAN-SLOM ke-4 yang diselenggarakan di Langkawi, Malaysia, 2011 silam.

"Dunia tengah menghadapi krisis ketenagakerjaan muda, termasuk di negara-negara ASEAN. Oleh karena itu, Forum ini memainkan peran penting dalam memperbarui komitmen negara-negara anggota ASEAN untuk mengatasi tantangan besar di bidang

Ketenagakerjaan muda diakui sebagai salah satu prioritas ASEAN karena kaum muda memiliki kontribusi besar untuk meningkatkan daya saing pasar tenaga kerja ASEAN

Mega Irena,

Asisten Direktur, yang juga Ketua Bidang Kesejahteraan Sosial, Perempuan, Tenaga Kerja dan Pekerja Migran Sekretariat ASEAN

ketenagakerjaan muda dan memperkuat kerjasama di kalangan ASEAN," kata Abdul Wahid Maktub, Staf Khusus Kemenakertrans. Ia yakin kaum muda memiliki potensi yang sangat besar bagi masyarakat dan perekonomian.

Forum ini memberi kesempatan bagi negara-negara anggota ASEAN untuk berkumpul dan berbagi informasi tentang praktik-praktik terbaik serta pelajaran yang diperoleh sambil menyusun rencana aksi yang komprehensif untuk mengatasi masalah pengangguran muda di kawasan ini. Forum yang bertujuan untuk memperkuat kerjasama dan kolaborasi di kalangan negara-negara anggota ini pun menyepakati serangkaian rekomendasi yang dapat dilaksanakan negara-negara anggota ASEAN di masa mendatang.

Para delegasi ini menyampaikan komitmen baru mereka untuk memasukkan masalah penyediaan program pelatihan bermutu yang

terkait dengan permintaan industri, pengembangan program magang terstruktur dan teratur, serta mendorong kewirausahaan di kalangan muda.

Belajar dari berbagai pengalaman yang diperoleh dari Forum Semarang ini tentang kebijakan nasional dan kerangka perundangan-undangan yang ada di masing-masing negara anggota, delegasi menegaskan perlunya kerjasama untuk mengarusutamakan masalah ketenagakerjaan muda di tingkat kebijakan dengan berbagi informasi secara lebih baik, transisi yang lebih baik dari sekolah ke tempat kerja, layanan pekerjaan, migrasi pekerja, informasi tentang pasar tenaga kerja bagi kaum muda serta perlindungan sosial.

Forum ini dihadiri oleh delegasi dari negara-negara ASEAN seperti Indonesia, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Thailand dan Vietnam.

Saat ini, terdapat sekitar 75 juta pengangguran muda di seluruh dunia dan 40 persen di antaranya berada di kawasan Asia Pasifik. Krisis ekonomi global 2008 juga telah mengakibatkan kenaikan jumlah pengangguran secara signifikan, di mana terdapat tambahan 7 juta orang muda yang menjadi pengangguran akibat krisis tersebut. Secara global, masalah ini sudah diangkat dan dibahas di berbagai forum global, termasuk G-20 dan Konferensi Perburuhan Internasional (ILC). ❖

Akses ke Mata Pencarian Hijau untuk Respons Lingkungan yang Inklusif di Kalimantan Tengah terhadap Perubahan Iklim (GLACIER)



Sekilas:

Sebagai bentuk pengakuan terhadap kebutuhan besar untuk mengurangi emisi gas rumah kaca akibat penggundulan dan degradasi hutan, pemerintah Indonesia mengeluarkan instruksi untuk menghentikan pembukaan hutan antara tahun 2011 hingga 2013 dan menginstruksikan diperlukannya rehabilitasi dan konservasi kawasan Eks Proyek Lahan Gambut (Eks PLG) di Kalimantan Tengah. Sejalan dengan rencana awal Eks PLG, ILO Indonesia bersama dengan UNDP, melalui pendanaan dari pemerintahan Norwegia, menjalankan proyek percontohan selama 12 bulan yang berusaha memperbaiki akses ke mata pencarian yang berkelanjutan bagi komunitas lokal di wilayah proyek Eks PLG di Kalimantan Tengah. Menerapkan prinsip-prinsip yang tertuang pada Konvensi ILO mengenai Masyarakat Adat (No. 169), proyek ini menggunakan berbagai pendekatan dialog dan partisipatif untuk mendukung pemberdayaan komunitas lokal di sepanjang proses pelaksanaan proyek. Intervensi utama meliputi, "pekerjaan yang mendukung kelestarian lingkungan" serta "pembangunan rantai pasokan yang mendukung kelestarian lingkungan", yang mengaitkan respons kebijakan publik dan pasar dalam kerangka mata pencarian untuk mengatasi dampak perubahan iklim. Proyek ILO-GLACIER berakhir pada November 2013.

Didukung oleh:



Capaian Tahun 2013:



1. **Terciptanya 13.292 hari kerja di lima desa sasaran hingga September 2013 dengan melakukan investasi infrastruktur lingkungan dan akses,** termasuk pekerjaan yang mendukung lingkungan seperti kegiatan penanaman hutan kembali di area tanah gambut yang terdegradasi, penanaman agro-hutan dan investasi akses infrastruktur di tingkat desa. Kesempatan lapangan kerja jangka pendek ini memberikan manfaat kepada 422 orang (280 laki-laki dan 142 perempuan) dengan rata-rata 32 hari kerja per orang.
2. **Rehabilitasi 176 hektar lahan yang terdegradasi** dengan 120.000 bibit tanaman karet, buah dan pohon hutan asli daerah tersebut, serta infrastruktur pencegahan kebakaran hutan termasuk sumur-sumur air, pemadam api, pompa air, serta menara-menara pengawas kebakaran.
3. **Rehabilitasi 200 meter jembatan penyeberangan dan 687 meter jalan raya dan jalan setapak untuk meningkatkan akses pedesaan.** Para penerima manfaat juga dilatih mempergunakan metode dan material kerja yang ramah lingkungan.
4. **Promosi strategi mata pencarian jangka menengah dan panjang melalui pendekatan pembangunan rantai suplai yang ramah lingkungan,** dengan sebanyak 256 petani menerima pelatihan teknis dalam teknik memanen (karet dan perikanan) serta pelatihan kewirausahaan. Hubungan dengan pasar dibentuk dan layanan pengembangan usaha disediakan oleh LSM lokal untuk memperkuat pembentukan kelompok-kelompok petani/koperasi bagi kelompok petani karet serta peternak ikan skala kecil.
5. **Promosi strategi mata pencarian jangka menengah pada peternakan ikan** melalui pembangunan 25 kolam ikan, pengenalan teknologi yang tepat untuk menghasilkan bibit ikan, dan pengorganisasian para penerima manfaat ke dalam kelompok-kelompok peternak ikan. Model ini direplikasi oleh komunitas lokal di dua desa, dengan pembangunan 15 kolam ikan tambahan yang mempergunakan dana mereka sendiri.
6. **Promosi strategi mata pencarian jangka panjang dalam pertanian karet** melalui forum petani karet yang membentuk jaringan antara petani dan pabrik-pabrik, pembangunan taman-taman pembibitan karet, pelatihan teknis untuk penyadapan karet dan penyediaan pelatihan kewirausahaan. Kelompok-kelompok petani karet di kedua desa telah membangun hubungan langsung dengan pabrik-pabrik, yang memungkinkan bagi para petani desa untuk mengakses harga premium bagi produk-produk mereka.

Kisah Neneng: “Ladang-Ladang Kami Sekarang Lebih Produktif”

Tinggal di Lawang Kajang, sebuah desa kecil di sepanjang Sungai Kapuas, Kalimantan Tengah, Neneng berasal dari Katujung, sebuah desa di kabupaten tetangga. Dia orang Dayak, masyarakat mayoritas di Kalimantan yang menikahi Junedi, yang berasal dari Lawang Kajang, pada awal tahun 1990-an. Kini Junedi menjabat sebagai kepala desa dan mereka telah dikaruniai empat orang anak.

Neneng dan Junedi memiliki lebih dari 17 hektar lahan yang tersebar di berbagai lokasi. Pada saat mereka membeli lahan tersebut, tidak ada apapun hanya semak-semak. Hutan kaya yang sebelumnya meliputi area tersebut telah ditebang dan dibakar oleh para pemilik sebelumnya untuk menanam padi. Neneng menggunakan bibit dari beberapa tanaman karet yang masih tersisa di lahan tersebut untuk mengubah enam hektar lahan menjadi kebun karet. Tiga tahun lalu, sebuah perusahaan minyak sawit menghubungi mereka untuk menanam 10 hektar tanah mereka dengan kelapa sawit.

Kendati demikian, mayoritas anggota komunitas tidak berhasil menyulap lahan mereka menjadi bernilai secara ekonomi. Dulu lahan di Lawang Kajang memang dipenuhi hutan lebat namun kini telah menjelma menjadi lahan terbuka yang hanya ditumbuhi semak-semak. Menurut adat di desa tersebut, lahan menjadi properti pribadi saat seseorang dapat memperlihatkan bahwa ia bisa mengurusnya. Alhasil, para penduduk desa secara berlebihan

melakukan pembabatan dan pembakaran hutan untuk kemudian ditanam dengan tanaman pertanian serta kemudian mengklaim lahan tersebut sebagai milik mereka.

Seiring dengan waktu, kualitas tanah berkurang sehingga tidak lagi baik untuk ditanami tanaman pertanian atau perkebunan. Penduduk pun kemudian meninggalkan lahan untuk memulihkannya kembali selama 20-30 tahun. Metode tebang dan bakar juga menjadi penyebab utama kebakaran hutan di sekitar Lawang Kajang dan kebakaran hutan telah mengakibatkan penggundulan dan degradasi hutan sekitar. Neneng menyaksikan lahannya terbakar pada suatu waktu, namun karena tidak ada tanaman yang berharga yang tumbuh di atasnya saat itu, ia tidak berupaya menghentikan kebakaran tersebut.

Sebagai respons terhadap isu ini, melalui proyek GLACIER, ILO mengembangkan perkebunan tumpang sari dengan mempergunakan empat spesies tanaman: rambutan, durian, karet dan nanas. Model agro-kehutanan ini mampu memberikan variasi sumber pendapatan bagi para penduduk desa dalam jangka menengah hingga jangka panjang. Neneng juga berpartisipasi dalam pelatihan hutan agro yang diorganisasi oleh ILO. Neneng belajar mengenai jarak optimal untuk model tumpang sari dan bagaimana membersihkan semak belukar tanpa menggunakan api. Mereka juga mempelajari bagaimana membuat pupuk

organik dengan menggunakan semak belukar dan sisa sayuran dalam bentuk kompos.

“Dengan kombinasi beberapa spesies pohon, saya sekarang dapat memanen produk yang berbeda seperti karet dan buah-buahan. Keragaman

spesies yang tumbuh di lahan juga bisa meningkatkan kesuburan tanah,” ujar Neneng, seraya menambahkan perkebunan-perkebunan baru juga mampu mendorong petani-petani lain untuk melawan penyebaran kebakaran hutan guna melindungi perkebunan mereka yang berharga.

Untuk penanaman tumpang sari, Neneng menerima 130 bibit rambutan, 65 bibit durian, 163 bibit karet dan 780 bibit nanas pada bulan Juli. Jika model *agroforestry* berhasil, hal tersebut akan memberikannya pendapatan yang terdiversifikasi dalam jangka panjang, serta bisa meminimalisir dampak gagal panen pada tanaman tertentu di tahun-tahun berikutnya.

Sekarang tugas utama Neneng adalah mempertahankan lahannya. “Sejak ILO datang kemari, ladang kami menjadi lebih produktif. Metode baru yang baik dan berguna telah berhasil kami terapkan. Itu membantu tanaman tumbuh dengan baik,” tegasnya. Neneng juga secara rutin menyirami lahan dengan air dari sumur baru yang dibangun sebagai bagian dari proyek ILO-GLACIER. Delapan sumur yang dibangun di Lawang Kajang sangat berguna untuk menghentikan kebakaran hutan pada musim kemarau. ❖

Pekerjaan Layak untuk Ketahanan Pangan



Sekilas:

Tidak terjaminnya pangan dan nutrisi serta terbatasnya kesempatan untuk memperoleh pekerjaan layak merupakan tantangan berat di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), wilayah yang paling terisolasi dan rentan. Sebagai tanggapan atas tantangan ini, ILO bersama Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT), bekerja sama dengan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), akan menerapkan proyek pembangunan ketahanan pangan dan pembangunan pedesaan selama tiga tahun dari tahun 2014-2016. Secara keseluruhan tujuan dari program ini adalah meningkatkan ketahanan pangan dan menurunkan tingkat kemiskinan masyarakat setempat. Khususnya penghasil skala kecil dan pekerja pertanian serta keluarga mereka, melalui peningkatan produktivitas dan pekerjaan yang layak serta kesempatan berwirausaha di rantai industri pangan pertanian dengan tingkat lapangan kerja yang tinggi serta menghasilkan potensi pendapatan yang baik.

Capaian Tahun 2013:

1. **Kemitraan dengan KPDT** untuk menciptakan dan melaksanakan proyek ketahanan pangan, dan dengan FAO membentuk kemitraan yang berbasis keahlian.
2. **Pelaksanaan kajian kebutuhan di kabupaten-kabupaten NTT** untuk menentukan lokasi percontohan serta mengumpulkan data terkait ketahanan pangan dan komoditas yang memiliki potensi tinggi. Empat kabupaten terpilih: Kupang, Belu, Sumba Timur dan Timor Tengah Selatan (TTS).
3. **Pemaparan proyek kepada para pemangku kepentingan di NTT melalui pelatihan jaminan pangan**, dengan melibatkan pemerintah lokal, LSM, universitas serta penerima manfaat. Pelatihan tersebut menggarisbawahi pentingnya pekerjaan serta penghidupan yang layak di industri pertanian menegaskan pentingnya pekerjaan yang layak dan mata pencarian di bidang pertanian untuk meningkatkan jaminan pangan, dan menyediakan kesempatan untuk berkonsultasi dengan para anggota komunitas mengenai rencana pelaksanaan proyek.

4. **Mendukung Provinsi NTT untuk menjadikan pekerjaan yang layak sebagai bagian dari rencana pembangunan jangka menengah** dengan mengadakan lokakarya perencanaan untuk mempertemukan perwakilan provinsi dan kabupaten, serta mendukung mereka untuk menyetujui rekomendasi-rekomendasi yang dipresentasikan kepada gubernur NTT.



Rencana Tahun 2014:

1. Melaksanakan kajian partisipatif terhadap produk lokal dan sistem rantai pasokan terhadap tiga komoditas di empat kabupaten dengan tujuan mengidentifikasi ancaman dan kesempatan di sepanjang rantai pasokan tersebut, sehingga mampu menghasilkan rekomendasi-rekomendasi guna meningkatkan efisiensi dan mendukung pekerjaan layak serta peluang wirausaha.
2. Membentuk kelompok-kelompok kerja tingkat provinsi dan kabupaten untuk berpartisipasi dalam pembuatan rencana kerja berdasarkan hasil kajian rantai pasokan.
3. Meningkatkan kapasitas perwakilan pemerintah dengan menjalankan program pelatihan pengembangan serta kajian rantai pasokan secara komprehensif, sehingga memungkinkan para pembuat kebijakan dan otoritas lokal untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan di dalam rantai pasokan produksi pangan.
4. Melaksanakan sejumlah pelatihan lokakarya mengenai kewirausahaan, keterampilan kejuruan dan keuangan untuk meningkatkan kapasitas penyedia pelatihan pemerintah dan LSM, serta bagi para anggota komunitas yang tengah mencari kesempatan untuk memulai atau meningkatkan usaha serta keterampilan mereka.

Program Kesinambungan Daya Saing dan Tanggung Jawab Perusahaan (SCORE)



Sekilas:

Diluncurkan pada Juli 2010, program SCORE Indonesia dirancang untuk membantu usaha kecil-menengah (UKM) di Indonesia agar dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas, memperbaiki kondisi kerja, mengurangi jejak (karbon) lingkungan dan mempererat kerjasama serta komunikasi antara pengusaha dan pekerja. Program ini membantu perusahaan agar lebih berdaya saing di pasar global sehingga menciptakan lapangan kerja.

Didanai Sekretariat Negara Swiss untuk Urusan EKonomi (SECO) dan Badan Kerjasama Pembangunan Nowergia (NORAD), program SCORE ini didukung dan dilaksanakan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dan konfederasi serikat pekerja nasional. Indonesia terpilih sebagai satu dari tujuh negara bersama dengan India, Cina, Afrika Selatan, Ghana, Vietnam, dan Kolombia untuk menerapkan program SCORE.

Didukung oleh:



Capaian Tahun 2013:

1. **Pelaksanaan proyek percontohan tentang pengaturan jam kerja untuk UKM di wilayah Jakarta dan sekitarnya** dan dilakukan selama 12 bulan, dengan tujuan meningkatkan kinerja perusahaan sekaligus kepuasan kerja karyawan, termasuk keseimbangan antara kerja-kehidupan melalui pengaturan jam kerja yang lebih baik. Proyek percontohan ini merupakan hasil kerja bersama Departemen Ketenagakerjaan dan Kesetaraan ILO di Jenewa.

2. **Perpanjangan Proyek SCORE hingga tahun 2016.** Karena keberhasilan pelaksanaan tahap I SCORE Indonesia, SECO dan NORAD, sebagai dua donor utama, memberikan perpanjangan selama tiga tahun.

3. **Dua perusahaan (CV ATS di Sulawesi Selatan dan Asindo Tech di Lampung) di bawah program SCORE menerima penghargaan Paramakarya 2013.** Paramakarya merupakan penghargaan khusus bagi UKM dari pemerintah Indonesia atas produktivitas dan kualitas yang sangat baik.

4. **Baiknya kemitraan dan sinergi antara program SCORE dan Better Work Indonesia (BWI).** Sinergi ini diarahkan untuk memperbaiki kerjasama dan produktivitas di tempat kerja serta mengurangi tingkat penolakan barang di lima pabrik BWI.

5. **Penerapan strategi pemasaran online SCORE** melalui perbaikan dan peremajaan situs internet dan perangkat media sosial SCORE.

6. **Pelaksanaan kampanye informasi SCORE** melalui penyebaran brosur-brosur tripartit yang sudah direvisi.

7. **Pemeliharaan sistem pangkalan data Pemantauan dan Evaluasi SCORE,** dengan hasil sebagai berikut: 337 lapangan kerja baru tercipta, 88 perusahaan berpartisipasi, 92 instruktur dan 495 karyawan dilatih (44 persen manajer dan 56 persen pekerja).

✉ scoreindonesia@gmail.com
f [SCORE.Indonesia](https://www.scoreindonesia.net)
www.scoreindonesia.net
ILO SCORE
@SCORE Indonesia



Rencana Tahun 2014:

1. Memperluas pelatihan perusahaan SCORE Indonesia untuk modul 2-5 di lima provinsi.
2. Memberi dukungan pelaksanaan SCORE modul 1 oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
3. Memperkuat kampanye publik tentang program-program SCORE dan praktik-praktik bertanggung jawab di tempat kerja.
4. Memberikan sertifikasi SCORE global bagi para pelatih Indonesia.

Kerjasama SCORE dengan Better Work Indonesia: Bagaimana Sebuah Pabrik Mampu Meningkatkan Produksi

Suara mesin jahit terdengar nyaring dari lorong-lorong PT Logos Indonesia. Bangunan kecil di pabrik tersebut menampung 233 orang pekerja yang bertugas memasang logo untuk pakaian dari merek-merek terkenal. PT Logos termasuk salah satu pabrik kecil di Jakarta. Perusahaan ini dianggap sebagai lokasi percontohan yang sempurna untuk program Better Work Indonesia (BWI) dan program Kesenambungan Daya Saing dan Tanggung Jawab Perusahaan (SCORE) ILO untuk melaksanakan serangkaian pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan menghormati hak-hak pekerja.

Hanya tiga bulan setelah pelatihan modul pertama SCORE, dari lima modul pelatihan yang ada, perubahan sudah terlihat nyata dalam sistem produksi PT Logo. Manajemen mengatakan bahwa mereka belajar sambil bekerja. "Kini Anda dapat melihat bagaimana bersihnya lorong-lorong kami. "Tempat kami sempit jadi kami harus pintar memanfaatkannya," kata M. Manalu, Staf PT Logo.

Sebelum SCORE dilaksanakan, pabrik ini sering menghadapi masalah sampel dan pola pakaian yang berserakan di segala penjuru ruangan. Tapi setelah mengikuti program ini, pihak manajemen mampu menciptakan sistem yang memudahkan pekerja menemukan bahan-bahan yang mereka butuhkan. "Program ini membantu kami meningkatkan kebersihan dan kerapian pabrik," lanjut Manalu.

Menurut manajemen senior, hasil dari pelatihan ini juga sangat dirasakan oleh para pekerja. Sebagai contohnya, penurunan jumlah barang yang ditolak (reject) pun berkurang dari 3 persen menjadi 2,5 persen. "Tapi kami ingin melihat angka ini berkurang menjadi nol persen," kata Hendrawan, ketua lembaga kerjasama bipartit di PT Logos.

"Tujuan utama dan akhir program SCORE adalah membuat perusahaan-perusahaan seperti PT Logos bisa menjadi lebih kompetitif di pasar nasional dan global," ujar Januar Rustandie, Manajer Program SCORE di Indonesia

BWI mulai melaksanakan penilaian independen tentang pabrik-pabrik garmen di Indonesia sejak 2011 dan berkomitmen untuk memperbaiki kondisi di tempat kerja. Program pelatihan yang baik adalah salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut.

Bekerja sama dengan SCORE, inisiatif ILO yang lain, BWI menawarkan metode-metode pelatihan yang sudah dicoba dan teruji untuk diterapkan di berbagai perusahaan. "Sudah ada sistem pelatihan yang baik dengan para pelatih (SCORE) berpengalaman. Mari kita gunakan kerangka kerja yang sudah ada ini untuk menciptakan sinergi antar program-program ILO," kata Simon Field, Manajer Program BWI.

Ada lima modul dalam paket ini, yang mencakup modul tentang kepemimpinan dan kerjasama di tempat kerja. Modul ini mampu menjawab salah satu keluhan yang kerap disampaikan

pekerja dari pabrik garmen Indonesia, yakni kurangnya keterampilan pihak manajemen dan serikat pekerja dalam berkomunikasi. Problem seperti inilah, salah satu yang ingin diperbaiki manajemen PT Logos di masa mendatang.

"Komunikasi antara pekerja dengan manajemen sangat penting untuk mengatasi permasalahan yang ada di tempat kerja. Saat ini, kami punya papan pengumuman namun kami ingin memanfaatkannya secara lebih tepat," terang Hendrawan.

Walaupun sebagian besar pekerja sudah menerapkan peraturan perusahaan tentang keselamatan melalui komunikasi yang baik, namun manajemen mengatakan mereka masih menghadapi masalah dalam meyakinkan para pekerja untuk menggunakan masker pengaman di salah satu ruangan dengan bahan kimia berisiko tinggi. Sebagian besar pekerja memang sudah menerapkan kebijakan tentang pemakaian masker dan alat penutup telinga, tapi untuk melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan bahan kimia berisiko tinggi, pekerja masih enggan mengenakan masker besar yang terbuat dari bahan plastik hitam.

"Mereka menganggap masker ini membuat penampilan menjadi jelek," kata Hendrawan.

BBWI akan menawarkan program pelatihan SCORE untuk pabrik-pabrik peserta lainnya di masa mendatang.

Dan, "Logos bisa menjadi pelopornya," kata Field. ♦

Mendorong Usaha Mikro dan Kecil Melalui Peningkatan Akses Pengusaha ke Layanan Keuangan dan Usaha Ramah Lingkungan (PROMISE IMPACTS)



Sekilas:

Usaha mikro dan kecil (UMK) mencakup 99,9 persen dari jumlah keseluruhan perusahaan di Indonesia dan 91,7 persen dari jumlah keseluruhan lapangan kerja. Terlepas dari peran penting ekonomi mereka, UMK menghadapi permasalahan struktural, fiskal dan non-fiskal serta tantangan yang signifikan. Sebagai upaya untuk menjawab tantangan tersebut, proyek ILO-PROMISE IMPACTS bertujuan meningkatkan akses dan kualitas keuangan UMK Indonesia melalui tiga tahap strategi yang saling berkaitan, sekaligus menanggulangi masalah pasokan, permintaan dan kebijakan dari sisi keuangan.

Proyek ini juga berkontribusi terhadap Strategi Inklusi Nasional, yang memfokuskan sasaran pada strategi sektor ekonomi dan juga Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025. Program ini direncanakan dimulai pada kuartal ketiga tahun 2013. Namun akibat adanya penundaan proses persetujuan dari Sekretariat Negara Swiss untuk Urusan Ekonomi (SECO), sebagai donor utama, program ini kemudian dijadwalkan kembali untuk dimulai pada kuartal kedua tahun 2014.

Didukung oleh:



Capaian Tahun 2013:

1. **Penerapan tahap awal proyek PROMISE IMPACTS, bekerja sama dengan Bank Indonesia.**
Di tahap awal, proyek ini memfokuskan diri pada dua sektor ekonomi utama yang diuraikan dalam MP3EI: industri garmen dan tekstil di Jawa Barat serta industri makanan dan minuman di Jawa Timur.
2. **Peningkatan kesadaran para pemangku kepentingan serta pembuat kebijakan mengenai pentingnya mengukur kinerja sosial dalam mengawasi kinerja lembaga keuangan mikro** melalui seminar nasional. Selanjutnya, hasil dari studi dengan Bank Indonesia mengenai dampak tahap awal proyek PROMISE IMPACTS telah disebarluaskan dan masukan terhadap penerapan kegiatan proyek telah dikumpulkan.



Rencana Tahun 2014:

1. Mengidentifikasi penyedia layanan keuangan untuk membentuk layanan keuangan inovatif.
2. Mengadaptasi modul "*Memberdayakan Keuangan Mikro: Keberagaman Produk*" ke dalam konteks kondisi Indonesia.
3. Menyampaikan pelatihan manajemen keuangan mikro dan diversifikasi produk kepada mitra-mitra layanan keuangan.
4. Melakukan survei awal mengenai distribusi ukuran perusahaan dalam portfolio penyedia layanan keuangan yang berpartisipasi.
5. Mengidentifikasi tantangan-tantangan klien dan klien potensial dari penyedia layanan keuangan.
6. Menyediakan bantuan teknis kepada mitra-mitra penyedia layanan keuangan dalam merancang dan mengujicoba jasa keuangan inovatif.

Meningkatkan Kesadaran Kelompok Marjinal tentang Masalah Keuangan

Kurangnya kesadaran finansial di Indonesia, mendorong ILO untuk secara aktif mempromosikan inklusi finansial bagi kelompok-kelompok rentan melalui pelatihan kesadaran finansial yang memungkinkan mereka merencanakan masa depan, mengelola pemasukan, menghindari hutang yang berlebihan, serta mengelola secara lebih baik permasalahan hidup (seperti penyakit, bencana dan sebagainya)—yang dapat menempatkan mereka dalam situasi keuangan yang sulit sehingga jatuh terjerembap ke bawah garis kemiskinan.

Untuk meningkatkan kesadaran kelompok marjinal tentang masalah finansial, ILO bekerja sama dengan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) menyelenggarakan Pelatihan untuk Klien tentang Pendidikan Keuangan bagi Kelompok Marjinal pada 20-21 April 2013. Pelatihan dua hari itu diikuti oleh 25 orang perwakilan dari organisasi masyarakat madani dan organisasi masyarakat yang menangani kelompok marjinal seperti orang yang hidup dengan HIV (ODHA), pekerja seks, pengamen dan sebagainya

Pelatihan ini difasilitasi oleh para pelatih yang telah mengikuti Pelatihan untuk Pelatih (ToT) dengan tema serupa yang diadakan pada Desember 2012. Tujuan utama pelatihan ini adalah meningkatkan pengetahuan finansial para peserta dari kelompok marjinal serta meningkatkan

Sekarang saya punya pengetahuan lebih tentang pengelolaan keuangan. Keluarga saya jadi lebih mampu mengelola pengeluaran kami untuk menghindari pengeluaran yang tidak perlu

Eka Dwi

Jaringan Aksi Perubahan Indonesia (JAPI)

keterampilan pelatih yang pernah mengikuti pelatihan agar mereka lebih berkompeten dalam mengadakan pelatihan serupa untuk anggota organisasinya, masyarakat serta para penerima manfaat.

“Keragaman peserta merupakan tantangan tersendiri. Tapi yang juga tak kalah penting adalah masukan dari peserta, karena sangat membantu saya sebagai pelatih untuk meningkatkan keterampilan dalam mengadakan pelatihan,” kata Evan Ma’ruf, salah seorang pelatih dari Generasi Muda Peduli Tanah Air (Gempita), sebuah organisasi yang menangani kaum muda.

Sementara itu, Novi Mudjiati, pelatih dari Jaringan Aksi Perubahan Indonesia (JAPI), mengaku, ia dapat mempraktikkan teknik pelatihan yang ia pelajari dari ToT



tersebut. Kini ia merasa lebih percaya diri dalam mengadakan pelatihan keuangan untuk para koleganya.

Di samping lebih percaya diri, para pelatih juga mampu memperbaiki cara mereka dalam mengelola perencanaan dan pengelolaan keuangan. “Kini saya lebih teliti dalam menghitung pengeluaran harian saya,” kata Merry dari JAPI. ❖

Program Peningkatan Daya Saing Usaha Kecil ASEAN



Sekilas:

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di ASEAN mencakup 90 persen dari perusahaan domestik dengan 75-90 persen tenaga kerja non-pertanian. Minimnya akses terhadap informasi mengenai bagaimana mengoperasikan serta membangun usaha menjadi tantangan terbesar bagi para pengusaha mikro dan kecil. Akibat keterbatasan cakupan dan modal, serta luasnya penyebaran geografis usaha tersebut, usahah mikro dan kecil menjadi sulit dijangkau. Di seluruh wilayah Asia terdapat persamaan operasional UMKM, baik dalam hal jasa maupun manufaktur, di mana penerapan-penerapan yang baik dapat diajarkan dan direplikasi.

ILO dengan dukungan ASEAN pun memfokuskan diri pada sektor pariwisata, di mana penerapan teknik-teknik jasa di antara negara-negara ASEAN tersebut memiliki kemiripan bahkan identik. Seperangkat alat dan pedoman teknik-teknik terapan akan dikembangkan dan disebarluaskan di seluruh negara ASEAN, diterjemahkan ke dalam seluruh bahasa resmi ASEAN serta mudah diakses secara *online* melalui pusat-pusat penyuluhan pemerintah dan non-pemerintah, LSM serta lembaga-lembaga pembangunan lainnya. Dengan cara ini akan memberikan pedoman bagi para pengusaha dan pekerja untuk belajar bagaimana membentuk, menjalankan dan memperbaiki usaha serta meningkatkan daya saing dan memperbaiki jasa pelayanan mereka.

Didukung oleh:



Capaian Tahun 2013:

1. **Dukungan terhadap proyek oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Indonesia**, yang kemudian mendapatkan persetujuan dari ASEAN untuk menargetkan seluruh negara anggotanya.
2. **Pelaksanaan studi sektoral dan pemilihan sektor pariwisata yang dapat memperoleh manfaat dari pedoman UKM**. Subsektor mencakup antara lain rumah penginapan, agen perjalanan, restoran dan kios kerajinan tangan.
3. **Sosialisasi mengenai tujuan dan strategi proyek di pertemuan kerja UKM ASEAN** di Yangon pada November 2013, serta memperoleh dukungan dari negara-negara anggota ASEAN dan pemilihan sektor pariwisata.
4. **Pengembangan seperangkat alat bantu pertama, untuk UKM dan pengusaha**, yang terfokus pada rumah penginapan.



Rencana Tahun 2014:

1. Pelatihan percontohan di dua negara ASEAN, termasuk Indonesia, untuk seperangkat alat bantu pertama mengenai rumah penginapan dengan para pemangku kepentingan agar masukan serta usulan perbaikan dapat diperoleh.
2. Mengembangkan perangkat alat bantu untuk delapan subsektor pariwisata yang berbeda.

Program Pembangunan berbasis Masyarakat (PcDP) Tahap II: Pelembagaan Pembangunan Mata Pencarian yang Berkelanjutan untuk Masyarakat Papua



Sekilas:

Proyek bersama ILO/UNDP dalam melembagakan pembangunan mata pencarian yang berkelanjutan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat adat Papua, melalui sistem dan proses pengembangan mata pencarian berkelanjutan yang berbasis pada pemerintah daerah dan masyarakat madani. Dengan dana dari pemerintah Selandia Baru, proyek ini berfokus pada peningkatan kapasitas para penerima manfaat yang ditargetkan, termasuk masyarakat adat Papua, di lima daerah sasaran: tiga kabupaten/kota di Papua (Jayawijaya, Sarmi dan Boven Digoel) dan dua kabupaten/kota di Papua Barat (Manokwari dan Fak-fak). Pada akhir program, para pemangku kepentingan diharapkan dapat menggunakan informasi pasar tenaga kerja untuk memberikan layanan pengembangan usaha kepada masyarakat, termasuk 1) Dukungan terhadap pengembangan usaha lokal di Papua Barat; 2) Fasilitas atas akses ke layanan keuangan bagi beberapa kelompok usaha lokal terpilih; dan 3) Pendirian Pusat Pengembangan Usaha Mikro/Inisiatif Inkubasi. Proyek ini berakhir pada Desember 2013.

Didukung oleh:



Capaian Tahun 2013:

Dukungan terhadap usaha lokal yang berpotensi dan fasilitas atas akses keuangan

1. Pembentukan kemitraan dan integrasi program dengan Bank Indonesia Papua dan Papua Barat

tentang inklusi keuangan, kajian terkait lembaga keuangan mikro, kegiatan pembangunan kapasitas, penyedia layanan pengembangan usaha percontohan dan pelatihan pengembangan usaha mikro. Selain itu, kemitraan dengan Bank Indonesia mencakup pelatihan keterampilan tentang nilai tambah produk dan peralatan produksi sebagai aset usaha utama, yang disasarkan kepada para lulusan pelatihan Kewirausahaan Berbasis Gender (GET Ahead) dan Pendidikan Keuangan ILO di tiga kabupaten: Jayawijaya (ubi bernilai tambah), Manokwari (cabai bernilai tambah) dan Fak-fak (pala bernilai tambah).

2. Pengelolaan usaha sederhana untuk pengembangan usaha mikro oleh 504 pengusaha adat Papua (65 persen pengusaha perempuan) sebagai penerima manfaat, yang berfokus pada pengelolaan keuangan, pembukuan, pengembangan rencana usaha, dan akses ke lembaga keuangan mikro. Sebuah basis data dari para pengusaha

terpilih ini juga telah dibuat dan mereka telah diberikan dukungan pasca pelatihan selama dua bulan.

Pendirian Penyedia Layanan Pengembangan Usaha (BDSP)

1. Peningkatan keahlian manajerial dan teknis dari delapan Lembaga lokal di Papua dan Papua Barat untuk menjadi Pusat Pengembangan Usaha/ Penyedia Layanan Pengembangan Usaha (BDSP)

di tingkat kabupaten dan provinsi. Layanan yang diberikan oleh pusat layanan ini termasuk pengelolaan usaha dan keuangan, pemasaran, pengelolaan pameran dagang, konseling usaha dan akses ke lembaga-lembaga keuangan mikro, menggunakan modul-modul GET Ahead dan Pendidikan Keuangan untuk Keluarga ILO.

2. Alokasi anggaran oleh Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dari pendanaan APBD 2014

untuk mendukung biaya operasional BDSP Oikonomos Papua serta biaya operasional dan dukungan infrastruktur dalam bentuk sebuah bangunan untuk Pasar Induk Wamena sebagai Pusat Konsultasi Usaha, dan mempertahankan inisiatif Proyek ILO/UNDP tentang BDPS.

3. Di bawah kerangka kerja kemitraan dengan Bank Indonesia, dilakukan pendampingan bersama kepada BDSP di Provinsi Papua

melalui partisipasi dalam acara nasional tentang pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah di Tasikmalaya, Jawa Barat. Acara ini diadakan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) (*merujuk pada kisah sukses Cynthia Warwe*).



Capaian Tahun 2013: (lanjutan):

4. **Pelatihan bagi 35 pejabat pemerintah daerah dan pejabat terpilih (43 persen perempuan) dari delapan BDSP di tingkat kabupaten sebagai pelatih kewirausahaan.** Para pelatih lokal ini akan memberikan layanan pengembangan usaha melalui pelatihan pengelolaan usaha, pemasaran, serta intermediasi pasar dan keuangan.
5. **Pembangunan kapasitas bagi 34 peneliti dan pendamping lokal (41 persen perempuan) dari universitas setempat** (Universitas Cendrawasih dan Universitas Ottow Geisler di Papua dan Universitas Negeri Papua/UNIPA di Papua Barat) tentang pengembangan rantai nilai, keuangan mikro, iklim usaha dan analisis diagnostik ketenagakerjaan. Peningkatan kapasitas ini juga ditargetkan ke badan-badan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda) di kedua provinsi tersebut.
6. **Pembangunan kapasitas dalam analisis rantai nilai dan pengembangan usaha serta diagnostik ketenagakerjaan** dari berbagai organisasi melalui serangkaian seminar dan lokakarya di lima kabupaten percontohan di Papua dan Papua Barat.

Berbagi pengetahuan dan pelajaran untuk keberlanjutan

1. **Penerbitan serangkaian studi tentang Pemetaan dan Kajian** tentang Situasi Terkini dari Akses ke Keuangan dan Pengembangan Usaha Mikro di delapan kabupaten yang ditargetkan serta dua provinsi di Papua dan Papua Barat.
2. **Penerbitan serangkaian analisis rantai nilai dan survei iklim usaha** di sejumlah kabupaten yang ditargetkan di Papua dan Papua Barat. Badan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Fak-fak dan Sarmi telah melakukan komitmen untuk menerapkan rekomendasi yang tertuang di dalam serangkaian survei tersebut.
3. **Penerbitan analisis diagnostik ketenagakerjaan** untuk Provinsi Papua dan Papua Barat.
4. **Pembuatan video dokumenter informatif**, yang merekam pencapaian, pelajaran yang diperoleh serta beberapa kisah sukses sebagai bagian dari program pembagian pengetahuan.
5. **Penyebarluasan semua penelitian, analisis dan survei** kepada para constituen terkait di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota untuk replikasi di masa mendatang.

Cynthia Warwe, 27, senantiasa memimpikan dapat memberi bantuan ke komunitasnya. Pada 2009, setelah lulus kuliah, Cynthia mulai bekerja di sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berpusat di Jayapura yang memfokuskan diri pada penguatan hak-hak dan kesejahteraan masyarakat adat. LSM itu bernama "Harapan Anak Papua di Indonesia" (HAPIN). Pada saat itu, Cynthia juga ikut serta dalam "Solidaritas Pedagang Asli Papua" (SOLPAP).

SOLPAP, bersama dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil-Menengah (Disperindagko) Provinsi Papua mendirikan Koperasi untuk Pengusaha Perempuan Asli Papua (Koperasi Mama-mama Pedagang Asli Papua/KOMMPAP), yang kini dikelola oleh Cynthia selain aktif di HAPIN dan SOLPAP. KOMMPAP bekerja untuk meningkatkan mata pencarian para pengusaha perempuan asli (dikenal sebagai *Mama-mama Papua* di Jayapura) melalui alih keterampilan. Organisasi tersebut saat ini memiliki 296 anggota, yang secara umum bekerja sebagai penjual ikan dan sayuran di sebuah pasar yang berpusat di Jayapura.

KOMMPAP telah menghadapi perjuangan yang sangat berat. Para pedagang perempuan asli menghadapi persaingan ketat dari pedagang pendatang, yang cenderung memiliki pengetahuan, keahlian serta akses atas modal yang lebih baik. Tingginya angka buta huruf dan tidak bisa berhitung juga menjadi penghambat perkembangan usaha.

Urwe: Mewujudkan Penghasilan Berkelanjutan untuk Para Perempuan Papua

Tingkat buta huruf nasional (untuk usia 15 tahun ke atas) kurang dari sembilan persen. Di Papua, tingkat buta huruf berkisar pada angka 36 persen (BPS 2012), dengan buta huruf lebih banyak di kalangan masyarakat adat. Dalam abad informasi ini, buta huruf dan tidak mampu berhitung sangat berdampak pada kemampuan pengusaha perempuan asli untuk merespons perkembangan pasar dan akses keuangan dari lembaga-lembaga keuangan mikro.

Yang membuat Cynthia sangat kecewa, pelatihan pengembangan usaha untuk *Mama-mama Papua* selalu gagal. Bila melihat kebelakang, ia menyadari pelatihan seperti itu tidak mempertimbangkan kebutuhan dan minat dari para perempuan asli Papua. Para pelatih, misalnya, sangat bergantung pada presentasi dan sumber tertulis untuk mengajarkan keahliannya, tanpa mempertimbangkan tingkat buta huruf yang tinggi dari para anggota KOMMPAP, yang mencapai 60 persen.

Pada 2012, semua ini berubah. Menjalani kemitraan dengan 'Program Pembangunan berbasis Masyarakat (PcDP) Tahap 2, sebuah program yang diterapkan oleh UNDP, ILO dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dengan pendanaan dari New Zealand Aid (NZAid), KOMMPAP mengubah dirinya menjadi Penyedia Layanan Pengembangan Usaha yang mampu menyediakan pelatihan yang disesuaikan dengan kondisi lokal serta dukungan lainnya kepada Mama-mama Papua.

“*Saya sekarang terampil dalam memberikan layanan pengembangan usaha yang cocok untuk kondisi lokal kepada para anggota KOMMPAP. Saya juga tahu bahwa pelatihan harus ditindaklanjuti dengan dukungan pasca-pelatihan, agar hasil pelatihan dapat berkelanjutan*”

“Dipersenjatai” dengan pelajaran yang diterima dari ILO, proyek ini mengadaptasi modul pelatihan ILO, yaitu Kewirausahaan berbasis Gender (GET Ahead) dan Pendidikan Keuangan untuk Keluarga. Para perempuan diajarkan keahlian mendasar, termasuk bagaimana memisahkan penghasilan mereka untuk keperluan konsumsi dan menabung, menyiapkan sebuah rencana usaha, mengakses keuangan dari lembaga-lembaga keuangan mikro, dan memperpanjang kondisi barang-barang yang dipajang. Mereka diajarkan melalui permainan peran, simulasi, permainan sambil belajar dan metode-metode pelatihan yang cocok untuk kondisi lokal.

Dengan dukungan PcDP Tahap 2 dan ILO, 45 anggota KOMMPAP ikut serta dalam pelatihan seperti itu. Dari jumlah

tersebut, 25 peserta kemudian dipilih untuk menerima pendampingan pasca pelatihan. Para pelatih dipilih berdasarkan kemampuan dan motivasi mereka untuk menerapkan keahlian yang dipelajari dari pelatihan. “KOMMPAP juga menggunakan anggarannya sendiri untuk melakukan dukungan pasca pelatihan, dan akan terus melakukannya setelah dukungan dari PcDP Tahap 2 berakhir,” kata Cynthia.

Bank Indonesia sangat terkesan atas kerja KOMMPAP sehingga memberikan pendanaan lebih besar untuk mendukung kehadiran Cynthia dalam pertemuan nasional mengenai Penyedia Layanan Pengembangan Usaha yang diketuai Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Tasikmalaya, Jawa Barat, pada Juni 2013. Dalam pertemuan ini, Cynthia diajarkan bagaimana mengelola koperasi di sektor swasta, termasuk bagaimana memperluas jaringan KOMMPAP yang sudah ada.

Saat ini PcDP Tahap 2, di bawah kemitraan dengan ILO, telah menyediakan pelatihan “2-in-1” dan dukungan pelatihan untuk 453 pengusaha dari Papua dan Papua Barat. Dari angka ini, 61 persen adalah perempuan. Menurut ILO, kaum perempuan cenderung menarik manfaat lebih banyak dari pelatihan seperti itu. Sekitar 46 persen perempuan, dibanding dengan 41 persen laki-laki, melanjutkan dengan memulai usaha baru atau mendapatkan pekerjaan baru setelah mengikuti pelatihan keterampilan usaha dan kejuruan. ❖

Program Pemulihan Mata Pencarian di Kepulauan Mentawai - Tahap II



Sekilas:

Program Pemulihan Mata Pencarian di Kepulauan Mentawai mendukung pemulihan perekonomian produktif terhadap 477 rumah tangga di komunitas Pagai Utara dan Selatan yang terkena dampak gempa bumi dan tsunami pada 2010. Program ini bertujuan memulihkan sektor pertanian dan perikanan, mengembangkan rantai nilai tambah pertanian dan perikanan serta mendukung perencanaan strategis mengenai penyediaan layanan dasar, termasuk air dan sanitasi.

Proyek ILO-Mentawai merupakan bagian dari upaya bersama badan PBB dengan FAO dan UNDP, yang didanai oleh pemerintah Selandia Baru melalui Indonesia Multi Donor Fund Facility for Disaster Recovery (IMDFF-DR). Program Bersama PBB ini bertujuan mencapai dua keluaran utama, yaitu: 1) Memulihkan, meningkatkan dan diversifikasi mata pencarian pertanian melalui pendekatan rantai nilai dan 2) Memperkuat kapasitas kelembagaan pemerintah daerah guna mendorong upaya pemulihan mata pencaharian dan mendorong penyediaan layanan sosial dan umum dasar.

Didukung oleh:



Capaian Tahun 2013:

- 1. Perluasan pasar yang dikembangkan oleh kelompok perempuan yang memproduksi makanan ringan dari KM 37 Pagai Selatan ke Padang.** Mereka mampu menjual produk pertama dari Mentawai secara rutin (*merujuk pada kisah sukses Lilis Suryani*).
- 2. Pelaksanaan kajian mendalam mengenai lembaga keuangan mikro di Mentawai,** yang bertujuan mengidentifikasi strategi dan program yang perlu dikembangkan untuk meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga keuangan mikro yang ada sehingga lembaga-lembaga tersebut dapat menjangkau masyarakat Mentawai yang sebagian besar hidup di daerah terpencil.
- 3. Pemantauan bersama ke lapangan** yang mengikutsertakan perwakilan dari PBB, New Zealand Aid, pejabat pemerintah terkait dari tingkat nasional, provinsi dan kabupaten. Pejabat pemerintah terkait termasuk pejabat dari Kementerian Pertanian, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Perikanan, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.



Kisah Lilis Suryani: Mengubah Tragedi menjadi Peluang pasca Tsunami



"Simananam" adalah produk makanan ringan pertama dari Kepulauan Mentawai yang mampu menembus pasar Padang. Sebagai salah satu daerah paling terisolir di negeri ini, produk-produk dari Mentawai sulit menjangkau pasar yang lebih besar. Di samping mutu dan kemasan produk, tantangan utamanya adalah pengiriman produk dari Mentawai ke Padang tergolong sulit.

Keripik talas Lilis harus menyusuri perjalanan selama empat jam melalui jalan sempit dan terjal di hutan belantara Mentawai. Perjalanan sekitar 37 kilometer, dari Desa Pagai Selatan di mana Lilis tinggal dan memproduksi keripik harus ditempuh untuk bisa sampai ke ibu kota Sikakap. Dari sana, produk masih harus meyeberangi laut selama 14 jam menggunakan kapal ferry yang hanya beroperasi seminggu satu kali ke Padang.

"Tsunami telah mengubah hidup saya menjadi lebih baik. Padahal saya tidak pernah bermimpi menjadi seorang pengusaha," kata Lilis, yang dulu membantu keluarganya mengelola perkebunan keluarga, seperti halnya sebagian besar masyarakat Mentawai, sebelum bencana tsunami menghantam kepulauan tersebut pada Oktober 2010. Bencana itu menimbulkan kerugian sebesar Rp 117,82 miliar, dan hampir 80 persen dari angka ini muncul dari subsektor perkebunan dan perikanan.

Lilis dan keluarga harus mengungsi ke lokasi yang lebih tinggi, sehingga ia harus meninggalkan pekerjaan dan kehilangan mata pencarian keluarga. Saat Lilis mendengar tentang program pelatihan pembuatan makanan ringan, ia bersemangat mengikutinya karena belum ada penghasil makanan ringan di lingkungannya. "Waktu saya mendengar tentang pelatihan tersebut, saya segera mengambil kesempatan sekali seumur hidup ini. Walaupun saya belum tahu apa-apa tentang produksi makanan ringan," katanya. Lilis mengikuti pelatihan ini sebagai sarana yang tidak saja untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuannya, tapi juga untuk menggunakan kesempatan ini agar bermanfaat bagi masyarakatnya.

Lilis merupakan salah satu dari 30 kaum muda terkena dampak tsunami dari Pagai Selatan dan Pagai Utara, Mentawai, yang terpilih dari sekitar 100 orang kandidat oleh Program Pemulihan Mata Pencarian Kepulauan Mentawai ILO. Bersama sembilan orang koleganya, Lilis dikirim ke Balai Pelatihan Universitas Padang untuk mengikuti pelatihan kejuruan pembuatan makanan ringan selama dua minggu atau 120 jam. Sedangkan, 20 peserta Mentawai lainnya mengikuti pelatihan servis motor dan pembuatan furnitur.

Untuk memastikan peserta pelatihan memiliki kapasitas untuk membuka usaha mereka sendiri, Lilis dan kelompok perempuannya memperoleh bantuan pasca-pelatihan dari ILO. Bantuan



Air mata bahagia mengalir di wajah Lilis Suryani, 23 tahun, saat mengingat enam bulan lalu, toko makanan ringan "Shirley" yang terkenal di Padang, Ibu Kota Sumatera Barat, melakukan pemesanan pertama sebanyak 100 bungkus keripik talas. Ya, Lilis adalah seorang pengusaha dari Mentawai yang memiliki spesialisasi makanan ringan. "Sulit dipercaya. Semua kerja keras saya membangun usaha ini akhirnya berhasil. Kini saya hidup sebagai seorang pengusaha," kata Lilis.

Order pun terus berdatangan. Dua kali sebulan atau kadang bahkan seminggu sekali, Shirley memesan 100 bungkus keripik talas Lilis bermerek "Simananam"—yang berarti "lezat" dalam bahasa lokal Mentawai. Harganya pun terjangkau, satu bungkus kecil keripik talas ukuran 100 gram dijual seharga Rp 5.000, sedangkan yang ukuran 250 gram dijual Rp 10.000 per bungkus.

“
*Tsunami telah mengubah
hidup saya menjadi lebih
baik. Padahal saya tidak
pernah bermimpi menjadi
seorang pengusaha*
”

diberikan dalam bentuk peralatan kerja, di samping pengemasan, merek, dan bantuan pemasaran, serta pembinaan usaha.

“Pelatihan ini merupakan bagi dari metodologi pelatihan “4 in 1” ILO yang memadukan survei keterampilan, pelatihan berbasis kompetensi, sertifikasi kompetensi dan dukungan setelah

pelatihan,” kata Lucky F. Lumingkewas, Staf ILO untuk Program Pemulihan Mata Pencarian Mentawai. “Namun, selain dukungan dan pelatihan kerja, hal yang paling penting adalah motivasi dan dedikasi dari para peserta. Motivasi dan semangat Lilis sangat luar biasa. Dia pantang menyerah apapun yang terjadi.”

Saat ini, Lilis dan kelompok perempuannya yang terdiri dari 10 orang memproduksi 300-500 bungkus keripik talas setiap dua minggu sekali, dan sedang dalam proses memperluas pasar mereka ke ibukota Tua Pejat, Mentawai, serta took-toko lainnya di Padang. Ia berharap dapat meningkatkan produktivitas usahanya agar dapat merekrut lebih banyak lagi perempuan di

desanya untuk bergabung dalam usaha ini.

Kepulauan Mentawai merupakan rantai kepulauan yang terdiri dari lebih 70 pulau dan pulau-pulau kecil di pantai barat Pulau Sumatera, Indonesia. Didanai Program Pemulihan Mata Pencarian Kepulauan Mentawai merupakan program bersama antara Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), Program Pembangunan PBB (UNDP) dan ILO. ILO terfokus pada intervensi pemulihan mata pencaharian dalam bentuk pengembangan keterampilan manajemen dan usaha melalui berbagai program pelatihan, termasuk pelatihan mengenai pengembangan usaha mikro, pemasaran dan proses pasca produksi. ❖



Rencana Tahun 2014:

1. Menyediakan bantuan teknis kepada kelompok perempuan yang memproduksi makanan ringan guna meningkatkan kualitas produk, produksi dan keterkaitan pasar di Padang dan Tua Pejat.
2. Memberikan bantuan teknis kepada kelompok otomotif dan produksi mebel guna meningkatkan penjualan dengan memperbaiki program promosi dan kualitas layanan konsumen.
3. Membangun kapasitas lembaga keuangan mikro agar dapat meningkatkan program penjangkauan ke masyarakat Mentawai yang terpencil di tingkat desa.
4. Bersama dengan kantor-kantor pemerintah kabupaten, menyelenggarakan pelatihan untuk pelatih mengenai pendidikan keuangan serta pelatihan untuk komunitas Mentawai di Pagai Selatan dan Pagai Utara.

Program Kewirausahaan Berwawasan Lingkungan Indonesia



Sekilas:

Pemerintah Indonesia telah mengidentifikasi kewirausahaan sebagai salah satu cara penting dalam mengatasi tingkat pengangguran serta untuk menanggulangi kemiskinan. Di saat yang sama, Indonesia menghadapi berbagai tantangan di bidang lingkungan di mana Presiden Indonesia telah berjanji mengurangi emisi setara CO₂ sebesar 26 persen dengan inisiatif sendiri dan hingga 41 persen dengan dukungan internasional pada tahun 2020. Guna mengatasi tantangan-tantangan tersebut serta mendukung strategi pembangunan pemerintah Indonesia, yaitu pro-masyarakat miskin, pro-pertumbuhan dan pro-lingkungan, ILO dengan dukungan Program Kemitraan ILO-Korea telah memperkenalkan Program Kewirausahaan Berwawasan Lingkungan Indonesia.

Program ini berupaya memberikan bantuan bagi para pengusaha berwawasan lingkungan di daerah perkotaan dan pedesaan di Indonesia, mendukung pergeseran ke perekonomian yang berwawasan lingkungan, serta mendorong tumbuhnya pekerjaan dan penciptaan lapangan kerja yang berwawasan lingkungan serta penurunan emisi gas rumah kaca di beberapa sektor perekonomian. Program juga bertujuan mendukung para pemangku kepentingan Indonesia dalam mengembangkan alat bantu mengenai kewirausahaan berwawasan lingkungan dengan konteks Indonesia berdasarkan pada Alat Bantu Kewirausahaan Berwawasan Lingkungan ILO (ILO Green Entrepreneurship Toolkit/SYGB), serta memberikan aktivitas peningkatan kapasitas dan membentuk sebuah program nasional untuk kewirausahaan berwawasan lingkungan.

Didukung oleh:



Capaian Tahun 2013:

1. **Pengembangan Sistem Pelatihan “Memulai Usaha Berwawasan Lingkungan Anda” (Start Your Green Business/SYGB).** Perangkat pelatihan yang baru dikembangkan dan terdiri dari modul-modul ini merujuk pada Pilihan Usaha Berwawasan Lingkungan dan Memulai dan Meningkatkan Usaha Anda (SIYB) yang berfokus pada lima sektor perekonomian (pariwisata, energi terbarukan, pengelolaan limbah, industri kreatif dan ketahanan pangan). SYGB disesuaikan bagi para pengusaha potensial yang ingin memulai bisnis berwawasan lingkungan berskala mikro atau kecil, yang menargetkan beragam kelompok sasaran: 1) pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja dan pengangguran, 2) pekerja migran, dan 3) laki-laki serta perempuan muda yang terdidik, termasuk pelajar dan lulusan universitas.
2. **Peningkatan kapasitas mengenai kewirausahaan berwawasan lingkungan untuk para pemangku kepentingan terkait,** termasuk badan pemerintah,

mitra sosial, universitas dan sektor swasta melalui penyelenggaraan lokakarya dan seminar teknis, yang bertujuan untuk menyosialisasikan dan mempromosikan paket-paket pelatihan Program Kewirausahaan Berwawasan Lingkungan dan SYGB serta memperoleh umpan balik untuk modul-modul kewirausahaan berwawasan lingkungan yang baru saja dikembangkan.

3. **Penerapan pelatihan untuk pelatih bagi 40 pelatih kewirausahaan berwawasan lingkungan,** termasuk Bank Indonesia dan Layanan Pengembangan Usaha di Jawa Timur dan Jawa Barat untuk mempromosikan Program Kewirausahaan Berwawasan Lingkungan.
4. **Penerapan serangkaian pelatihan untuk pengusaha SYGB,** berkolaborasi dengan Bank Indonesia, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Pemuda dan Olahraga dan mitra sosial ILO

lainnya. Serangkaian pelatihan ini diselenggarakan di Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, Jawa Barat dan Nusa Tenggara Timur, di mana 180 pengusaha berwawasan lingkungan baru dilatih di bawah program ini yang mayoritasnya telah memulai sebuah usaha berwawasan lingkungan.

5. **Penyelenggaraan Forum Kewirausahaan Berwawasan Lingkungan bersama dengan Bank Indonesia.** Forum ini menyusun serangkaian rekomendasi pokok, termasuk koordinasi dengan badan-badan pemerintah secara lebih baik dengan peta jalan mengenai kewirausahaan berwawasan lingkungan yang dipimpin oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Program ini akan dilakukan secara keberlanjutan dan merupakan perluasan dari Program Kewirausahaan Berwawasan Lingkungan.

Rencana Tahun 2014:

1. Melatih setidaknya 500 pengusaha berwawasan lingkungan baru mengenai SYGB dan melalui mitra-mitra nasional menggunakan sistem SYGB.
2. Fasilitator SYGB mendampingi setidaknya 100 pengusaha berwawasan lingkungan baru sebagai bentuk dukungan pasca pelatihan setelah pelatihan para pengusaha diselenggarakan.
3. Menyelenggarakan dua sesi forum Program Kewirausahaan Berwawasan Lingkungan, di mana pemerintah Indonesia menjadi tuan rumah.
4. Mengembangkan dan mempersiapkan alat bantu pelatihan untuk tahap SYGB berikutnya, yaitu tahapan lepas landas.

B. Hubungan industrial yang baik dalam konteks tata kelola ketenagakerjaan yang efektif

1. Administrasi ketenagakerjaan menyediakan pelayanan yang efektif untuk meningkatkan kondisi dan lingkungan kerja.
2. Konstituen tripartit terlibat secara efektif dalam dialog sosial untuk mengaplikasikan peraturan dan standar ketenagakerjaan internasional.
3. Penguatan kapasitas kelembagaan dari organisasi pengusaha dan pekerja untuk memberikan kontribusi menyuarkan hubungan industrial menurut mandat dan tanggung jawab mereka masing-masing.



Better Work Indonesia



Sekilas:

Better Work Indonesia (BWI) merupakan program kemitraan antara ILO dan Korporasi Keuangan Internasional (IFC). Program ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan standar ketenagakerjaan dan meningkatkan daya saing dalam rantai pasokan global. Fokus BWI adalah pada solusi yang terukur dan berkelanjutan melalui penguatan kerjasama antara pemerintah, organisasi pengusaha dan pekerja serta pembeli internasional. Perlindungan hak-hak pekerja mampu menyebarkan keuntungan dari kegiatan perdagangan untuk meningkatkan pengembangan sumber daya manusia, sosial dan ekonomi. Kepatuhan pada berbagai standar ketenagakerjaan dapat membantu perusahaan untuk menjadi lebih kompetitif, dengan meningkatkan akses ke pasar yang lebih luas dan para pembeli baru. BWI memadukan penilaian independen terhadap perusahaan dengan layanan pendampingan dan pelatihan untuk mendukung perbaikan nyata melalui kerjasama di tempat kerja.

Didukung oleh:



Capaian Tahun 2013:

1. **Pendaftaran 80 pabrik sebagai peserta aktif BWI per Desember 2013**, yang berlokasi di provinsi DKI Jakarta dan sekitarnya, Jawa Barat (Bandung, Sukabumi dan Majalengka) dan Jawa Tengah (Semarang) serta Yogyakarta (Sleman). Hingga saat ini layanan pendampingan dan penilaian BWI telah diterima oleh 78 pabrik.

2. **Adaptasi materi modul BWI ke konteks lokal, termasuk menerjemahkan modul ke dalam bahasa setempat jika diperlukan.** Tujuh pelatihan yang telah ditawarkan BWI adalah: 1) Manajemen Keselamatan Bahaya Kebakaran; 2) Kesehatan dan Keselamatan Kerja; 3) Anti-Pelecehan dan Kekerasan; 4) Kerjasama di Tempat Kerja; 5) Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit; 6) Pelatihan Pengawasan; serta 7) HIV dan AIDS di Tempat Kerja.

3. **Pembentukan kerjasama dengan instruktur ahli dalam bidang masing-masing** serta penerapan pendekatan partisipatif yang berkaitan dengan peningkatan partisipasi di antara para peserta di pelatihan-pelatihan tersebut.

4. **Respons aktif atas permintaan perusahaan untuk layanan pelatihan** sebagai berikut:

- Memberikan modul pelatihan wajib mengenai HIV dan AIDS untuk tujuh pabrik.
- Pelatihan gabungan NIKE dan BWI mengenai pelecehan seksual untuk pabrik-pabrik NIKE.
- Pelatihan gabungan GAP dan BWI mengenai LKS bipartit.
- Menyediakan pelatihan satu hari mengenai LKS bipartit untuk pabrik-pabrik di Semarang.
- Pelatihan gabungan GAP dan BWI mengenai lokakarya sensitivitas budaya. Pada acara ini, BWI dan GAP juga meminta partisipasi kedutaan besar Korea dan Kamar Dagang Korea.

5. **Peningkatan kapasitas konstituen tripartit BWI (Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, organisasi pekerja dan pengusaha)** melalui serangkaian pelatihan mengenai kebebasan berserikat, perundingan bersama, mediasi kerja, negosiasi dan sumber daya manusia.

6. **Penyebarluasan informasi terkait BWI** melalui sarana-sarana seperti laporan berkala, situs BWI, Facebook, SMS, Linked-In.



7. **Penyusunan beragam bentuk informasi** seperti berikut:

- **Sistem Pengaduan dengan Menggunakan SMS:** Sebuah sistem SMS yang menanggapi pengaduan para pekerja di pabrik-pabrik garmen di Indonesia. Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan akses: <http://betterwork.org/indonesia/wp-content/uploads/E-Newsletter-3rd-Edition-2013-English-Final.pdf>
- **Aplikasi Pedoman Hukum Ketenagakerjaan untuk Android:** Aplikasi ini

Capaian Tahun 2013: (lanjutan):

menawarkan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat untuk menerapkan peraturan ketenagakerjaan guna menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan adil. Untuk melihat aplikasi, silahkan akses: <https://play.google.com/store/apps/details?id=io.betterworkindonesia&hl=en>

- **Pembuatan Pedoman Pencegahan Pelecehan di Tempat Kerja:** Pedoman ini bertujuan untuk meningkatkan kondisi kerja sebagai faktor utama yang memastikan tempat kerja terbebas dari segala bentuk diskriminasi, termasuk pelecehan dan intimidasi. Untuk melihat pedoman tersebut, silahkan akses: http://betterwork.org/indonesia/wp-content/uploads/Guidelines-on-the-Prevention-of-Workplace-Harassment_ENG-3.pdf
- **Pembuatan rangkaian video untuk mencegah pelecehan, pelecehan seksual serta intimidasi:** Untuk melihat video silahkan akses: http://betterwork.org/indonesia/?page_id=3949

- **Penerbitan Laporan Sintesis Kepatuhan Ketiga.** Laporan ini menggarisbawahi isu-isu yang terkait dengan standar ketenagakerjaan pokok serta mencakup kondisi kerja, di antaranya mengenai pekerja anak, diskriminasi, perundingan bersama, perlindungan sosial, pembayaran lembur serta komite bipartit. Untuk melihat laporan, silahkan akses: <http://betterwork.org/indonesia/wp-content/uploads/synthesis-Report-III-BWI-English-final.pdf>
- **Penerbitan Laporan Survei Dampak terhadap Manajer:** Laporan ini dibuat untuk memahami permasalahan dan tantangan yang dihadapi pabrik dari sudut pandang para manajer sumber daya manusia, keuangan, produksi dan umum. Untuk melihat laporan, silahkan akses: <http://betterwork.org/indonesia/wp-content/uploads/Better-Work-Indonesia-Impact-Assessment-Manager-Report2.pdf>



Rencana Tahun 2014:

1. Lebih dari 150 pabrik berpartisipasi di BWI.
2. Meningkatkan komunikasi manajemen-pekerja - Program Disney.

BWI Mengatasi Keselamatan Bahaya Kebakaran

Pada saat kebakaran timbul di pabrik sandal Swallow di Jakarta Barat pada Maret 2010, para pekerja berlarian keluar untuk menghindari dari luapan api. Empat orang tewas terjebak di antara luapan api dan pintu darurat yang terblokir dan terkunci.

Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta menyalahkan pabrik karena telah melanggar aturan keselamatan. Tidak saja pintu darurat yang terkunci, di sana juga tidak terdapat alat pemadam kebakaran yang berfungsi, bahkan bahan kimia tidak tersimpan dengan baik—di mana bahan kimia tersebut dapat memicu api dan mengurangi waktu bagi para pekerja untuk melarikan diri.

Pintu darurat yang terkunci dan terblokir juga menyebabkan kebakaran pabrik yang fatal di Bangladesh pada akhir 2012 hingga menyebabkan 112 orang tewas, mayoritas di antaranya perempuan. Peristiwa kebakaran ini

telah mengingatkan kembali industri garmen untuk memastikan protokol pencegahan kebakaran harus diperhatikan kembali dan dipertahankan setiap langkahnya. “Ini adalah isu utama di pabrik-pabrik garmen saat ini. Kesalahan manusia bisa menyebabkan dampak yang besar,” ungkap Andy Agusta, Manajer Pemenuhan Standar PT Holilit International.

Agusta adalah salah satu dari banyak manajer yang bekerja sama dengan BWI selama bulan keselamatan kebakaran di bulan April. Pada 18 April 2013, BWI mengadakan pelatihan pencegahan kebakaran di Kawasan Berikat Nusantara (KBN), sebuah kompleks pabrik di Jakarta Utara. Dari hukum-hukum ketenagakerjaan hingga teknik-teknik pencegahan, peserta mampu memperluas pengetahuan mengenai apa yang bisa mereka lakukan untuk berkontribusi terhadap lingkungan kerja yang lebih aman. “Saya akan menganalisa semua

pelajaran yang saya pelajari saat kembali ke pabrik.” ujar Warlim Wibawa dari PT Csite Texpia. “Saya rasa secara keseluruhan, kami perlu menilai semuanya.”

Respons langsung seperti itulah yang dibutuhkan, kata seorang pelatih,

Lena Kurniawati dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Menurut dia, kesalahan manusia dan kekhilafan berkontribusi besar terhadap ketidakamanan lingkungan kerja, karena itu pelatihan serta pengadopsian hal-hal yang diajarkan menjadi penting untuk memperbaiki kondisi lingkungan kerja.

“Pabrik-pabrik dapat mencegah kebakaran dengan mengidentifikasi bahaya, mengontrol potensi bahaya jika sesuatu sangat rentan untuk terbakar. Misalnya jangan menaruh benda yang bersangkutan di dekat sumber panas; mempertahankan prosedur seperti mengecek mesin dan perlengkapan secara rutin, karena terkadang mesin dan perlengkapan sudah tidak lagi dalam kondisi baik; serta melatih personel,” lanjut Lena.

Pelatihan ini hanyalah satu bagian dari program BWI untuk mencegah bahaya kebakaran di pabrik. Melalui penilaian BWI, pabrik-pabrik dapat melihat celah dan zona-zona berpotensi bahaya sehingga keduanya dapat bekerja sama untuk meningkatkan kondisi lingkungan kerja.

Namun begitu memperbarui dan mempertahankan perlengkapan berkonsekuensi meningkatkan biaya yang tinggi. “Kami membutuhkan alat-alat pencegahan kebakaran (seperti alarm dan alat pemadam kebakaran), serta membentuk tim untuk mendukung pencegahan kebakaran. Namun yang paling penting, kami membutuhkan manajemen yang bersedia untuk mengganti pengaturannya,” ujar Agusta. ♦



BWI dan FSB Garteks: Sistem Pengaduan Melalui SMS

Bulan September 2013 merupakan awal bagi Federasi Pekerja Tekstil dan Garmen (FSB Garteks), yang ditandai dengan diluncurkannya teknologi berbasis telepon selular ke dalam struktur serikat pekerja. Teknologi yang secara umum dikenal sebagai sistem pengaduan melalui SMS adalah sistem komunikasi yang baru-baru ini diperkenalkan kepada serikat kerja di wilayah Asia-Pasifik.

“Saya sangat bangga karena Subang menjadi wilayah yang menerima kesempatan pertama mendengarkan penjelasan mengenai sistem pengaduan melalui SMS ini, dan menjadi yang pertama untuk mencoba sistem ini,” ujar Suherman, Ketua FSB Garteks Subang, dalam pidato pembukaannya saat acara sosialisasi sistem pengaduan melalui SMS ini pada 14-15 September di BB Padi,

Kini kami memiliki forum tersendiri untuk menyuarakan pengaduan dan perlakuan tidak adil yang kami alami. Selama ini kami hanya diam dan hanya menyuarakan keluhan kami kepada sesama pekerja. Menyampaikan keluhan kami pada manajemen tidak akan mengarah pada tindakan lanjutan

Nurbaeti,
member of FSB Garteks Subang



Distrik Subang (catatan: acara serupa juga dilaksanakan di Bogor pada 28-29 September).

Sistem pengaduan melalui SMS diprakarsai oleh BWI dan saat ini telah diintegrasikan ke dalam FSB Garteks. Diharapkan dengan diperkenalkannya sistem ini keluhan para pekerja dapat disampaikan secara tepat, sehingga menghindari adanya konflik atau sengketa di tingkat pabrik. Sistem ini juga memungkinkan bagi serikat pekerja mengawasi dan mengatasi kasus pengaduan kerja dengan mengambil langkah penyelesaian yang tepat.

Penggunaan sistem SMS ini sangatlah mudah. Para pengguna hanya perlu mengirimkan pesan dengan format sebagai berikut: nama pengirim, nama perusahaan, unit kerja, pesan/keluhan. Kemudian pengaduan ini akan diterima

dan secara sistematis akan diatur oleh komputer. Sistem ini kemudian akan menjangar keluhan sesuai dengan kategori yang telah diatur sebelumnya. Terdapat tiga nomor kontak dari tiga penyedia layanan jaringan selular yang berbeda, yang secara spesifik didedikasikan bagi para anggota FSB Garteks untuk menyampaikan keluhannya:

- Telkomsel: (0813) 1825 2000
- Indosat: (0857) 1099 2000
- XL: (0819) 0893 2000

Agus Wijiono, Ketua SP Garteks di tingkat pabrik di Bogor menyatakan, “Sistem pengaduan SMS ini membantu kami untuk meningkatkan transparansi serikat pekerja di tingkat pabrik.” Hal ini, ia menambahkan, dapat menjadi masukan dan juga koreksi terhadap prosedur operasional serikat pekerja di tingkat pabrik. ❖

C. Jaminan sosial untuk semua

1. Pemerintah dan mitra sosial memiliki kapasitas yang lebih besar dalam merancang dan menerapkan kebijakan dan program jaminan sosial.
2. Hambatan terhadap lapangan kerja dan pekerjaan layak dapat diatasi, khususnya kesenjangan gender dan penyandang disabilitas.
3. Penerapan efektif dari Rencana Aksi Nasional untuk Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.
4. Meningkatkan kerangka kebijakan, kelembagaan dan penerapan program untuk pemberdayaan dan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia dan pekerja rumah tangga.
5. Kebijakan dan program terpadu HIV bagi pekerja perempuan dan laki-laki.



Mendukung Pelaksanaan “Layanan Satu Atap” dalam Strategi Perlindungan Sosial di Provinsi Jawa Timur dan Maluku

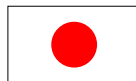


Sekilas:

Proyek ILO-Layanan Satu Atap (SWS) di Maluku dan Jawa Timur dibentuk sebagai tindak lanjut dari rekomendasi-rekomendasi yang diajukan dalam Penilaian berdasarkan Dialog Nasional pada 2011, agar berkontribusi terhadap mekanisme koordinasi yang lebih baik terhadap program-program perlindungan sosial di tingkat nasional dan provinsi. Didukung oleh pemerintah Jepang melalui Jaring Pengaman Sosial Jepang, proyek ini turut serta mendukung upaya nasional untuk memperluas perlindungan sosial dan bekerja pada tingkat lokal untuk membentuk layanan satu atap yang dapat menghubungkan program-program perlindungan sosial dengan program bantuan ketenagakerjaan yang ada.

Menggunakan pendekatan partisipatif untuk membangun rasa kepemilikan dan kelangsungan program, proyek ini bekerja sama dengan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota di Jawa Timur dan Maluku, terutama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan lembaga administrasi lokal. Konsep dan kemajuan SWS telah diinformasikan kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang bermaksud mengintegrasikan pendekatan tersebut ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

Didukung oleh:



Capaian Tahun 2013:

1. **Penyelesaian studi kelayakan desain Program Perlindungan Sosial SWS untuk provinsi Jawa Timur dan Maluku.** Studi kelayakan Jawa Timur tersedia dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, sementara studi kelayakan Maluku hanya tersedia dalam bahasa Indonesia.
2. **Berkontribusi pada koordinasi awal sistem rujukan tunggal bagi penduduk miskin oleh Bappenas** yang telah memulai mengerjakan Kerangka Acuan Pangkalan Data Terpadu untuk Daerah Tertinggal per Januari 2014.
3. **Penyelesaian rancangan dan aplikasi Sistem Informasi Perlindungan Sosial dan Ketenagakerjaan di wilayah Malang.** Sistem tersebut menyediakan informasi data penduduk miskin dengan identifikasi nomor kartu tanda penduduk, jasa informasi lapangan kerja (pangkalan data dengan kartu kuning), serta skema-skema yang berkontribusi terhadap informasi tersebut.
4. **Pelaksanaan sosialisasi bersama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan (Askes)** mengenai prosedur pendaftaran dan aplikasi manajemen sistem informasi di wilayah Kepanjen, Malang.
5. **Penyusunan Nota Kesepahaman mengenai proyek percontohan SWS untuk Provinsi Maluku dan Kota Ambon,** yang diharapkan dapat terlaksana di tahun 2014.
6. **Berkontribusi pada penyebaran alat informasi mengenai prosedur pendaftaran asuransi dan manfaat kesehatan** di kantor-kantor kecamatan serta puskesmas di daerah Ambon dan Malang.



Layanan Satu Atap untuk Perlindungan Sosial di Jawa Timur dan Maluku



Penilaian bersama yang dilaksanakan ILO dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terkait landasan perlindungan sosial yang dirilis pada 2012 lalu, menegaskan bahwa mekanisme perlindungan sosial di Indonesia disusun berdasarkan program-program bantuan sosial yang sudah ada. Meskipun demikian, program-program tersebut dikelola secara terpisah sehingga hubungan antara program perlindungan sosial dengan layanan ketenagakerjaan ini sangat terbatas dan dapat berdampak negatif terhadap efektivitas berbagai intervensi ini.

Untuk mengatasi masalah koordinasi ini, maka diadakan “Penilaian tentang Perlindungan Sosial Berdasarkan Dialog Nasional” yang merekomendasikan perlunya membentuk layanan satu atap (LSA) sebagai mekanisme koordinasi yang efektif. Berdasarkan rekomendasi ini, ILO bekerjasama dengan pemerintah provinsi dan kabupaten, memprakarsai beberapa proyek LSA di dua kabupaten pilihan di Provinsi Maluku dan Jawa Timur.

Proyek yang didanai Pemerintah Jepang ini bertujuan untuk memperluas jangkauan layanan sosial dan ketenagakerjaan yang ada, serta memfasilitasi koordinasi yang lebih baik di antara pemangku kepentingan terkait di semua level. Proyek satu tahun ini juga

bertujuan untuk membantu kelompok masyarakat yang paling rentan baik di sektor formal maupun informal, termasuk orang yang hidup dengan HIV dan AIDS (ODHA), melalui pendirian berbagai tempat yang menyediakan layanan sosial dan ketenagakerjaan satu atap.

Untuk meningkatkan kepemilikan dan kelangsungan proyek ini, pendekatan partisipatif akan diterapkan melalui serangkaian lokakarya dan rapat konsultatif dengan pemangku kepentingan tripartit terkait, LSM dan organisasi-organisasi berbasis masyarakat. Para mitra ini akan bersama-sama mengembangkan rencana kerja layanan satu atas, menyelesaikan desain layanan tersebut, merancang kegiatan serta melakukan rencana evaluasi proyek.

Pemerintah Kabupaten Malang menyambut baik terpilihnya mereka sebagai salah satu daerah sasaran. “Melalui proyek percontohan ini, kami berharap dapat mendapatkan Sistem Manajemen Informasi yang lebih baik, dimana semua informasi diintegrasikan sehingga dapat memberi akses yang lebih mudah dan baik kepada masyarakat ke layanan sosial dan ketenagakerjaan yang saling terkait satu sama lain,” kata Dr. Nehruddin, Kepala Dinas Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang. ♦

Proyek satu tahun ini juga bertujuan untuk membantu kelompok masyarakat yang paling rentan baik di sektor formal maupun informal, termasuk orang yang hidup dengan HIV dan AIDS (ODHA), melalui pendirian berbagai tempat yang menyediakan layanan sosial dan ketenagakerjaan satu atap.

Mempromosikan Hak dan Peluang bagi Penyandang Disabilitas dalam Pekerjaan melalui Peraturan Perundangan (PROPEL-Indonesia)



Sekilas:

Proyek PROPEL-Indonesia bertujuan mengatasi masalah kesenjangan dalam hal kebijakan dan perlindungan peraturan perundangan terkait pekerjaan dan pelatihan bagi para penyandang disabilitas guna memastikan kesesuaiannya dengan standar internasional. Proyek ini mendukung pemerintah serta pemangku kepentingan utama lainnya, dalam meningkatkan pemahaman tentang hak-hak penyandang disabilitas, terutama dalam hal pekerjaan dan pelatihan, melalui kerjasama dengan para mitra dalam membangun kapasitas pemangku kepentingan dan meningkatkan kesadaran tentang hak-hak penyandang disabilitas. Didanai Irish Aid, Proyek PROPEL-Indonesia dimulai pada Juni 2012, sebagai bagian dari proyek PROPEL global yang dilaksanakan di beberapa negara Asia dan Afrika.

Didukung oleh:



Capaian Tahun 2013:

1. **Penerbitan analisis hukum mengenai kesenjangan antara undang-undang dan peraturan nasional serta standar-standar internasional mengenai disabilitas**, terkait kesempatan kerja dan pelatihan. Hasil utama dari analisis tersebut dipresentasikan kepada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta para pemangku kepentingan lainnya.
2. **Penyelenggaraan serangkaian kegiatan peningkatan kesadaran, termasuk kampanye radio, di tingkat nasional dan di tiga provinsi** (Jawa Barat, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Timur), yang bertujuan mendorong hak dan peluang kerja bagi para penyandang disabilitas.
3. **Publikasi versi Indonesia dari dokumen-dokumen kunci ILO mengenai inklusi disabilitas di tempat kerja:**
 - 1) *Hak atas Pekerjaan yang Layak bagi Penyandang Disabilitas*,

- 2) *Mewujudkan Peluang Kerja yang Setara bagi Para Penyandang Disabilitas melalui Perundang-undangan*, dan
- 3) *Pedoman ILO tentang Pengelolaan Penyandang Disabilitas di Tempat Kerja*.

4. **Penyelesaian penelitian mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi para penyandang disabilitas** dalam mengakses peluang kerja, dilakukan bersama Universitas Katolik Atmajaya.

5. **Kemitraan dengan Universitas Katolik Atmajaya untuk memasukkan hak-hak penyandang disabilitas**, khususnya mengenai persoalan kerja dan kesempatan kerja, ke dalam mata kuliah hak asasi manusia di fakultas hukum.

6. **Pemaparan temuan-temuan utama dari kajian cepat** mengenai peluang pelatihan kejuruan untuk penyandang disabilitas.



7. **Penyelenggaraan pelatihan media mengenai isu-isu terkait disabilitas** sebagai upaya untuk mengembangkan panduan pelaporan media mengenai disabilitas.
8. **Pembuatan dua video diari mengenai disabilitas berjudul "SAMA: Ruang, Peluang dan Perlakuan terhadap Penyandang Disabilitas"**, berkerja sama dengan Yayasan Kampung Halaman. Pertama kalinya dilakukan, video-video ini diproduksi sendiri oleh para penyandang disabilitas di Jakarta menampilkan dua hak penting penyandang disabilitas: hak atas pekerjaan dan fasilitas umum yang layak. Menggunakan kata-kata, pilihan gambar mereka sendiri, video-video ini merekam keseharian, perjuangan, perjalanan dan harapan para penyandang disabilitas.

Rencana Tahun 2014:

1. Melakukan pelatihan penyegaran media untuk perwakilan media dan membuat panduan media mengenai penggambaran disabilitas.
2. Memublikasikan dan menyebarluaskan publikasi ILO mengenai disabilitas dalam ketenagakerjaan.
3. Membuat kurikulum yang diadaptasi mengenai inklusi hak-hak penyandang disabilitas, khususnya mengenai permasalahan pekerjaan dan ketenagakerjaan, ke dalam mata kuliah hak asasi manusia di Fakultas Hukum, Universitas Katolik Atmajaya.
4. Mendukung pemerintah pusat dan provinsi meninjau kerangka hukum mengenai disabilitas dan ketenagakerjaan.
5. Melanjutkan kampanye video partisipatif mengenai disabilitas melalui penyebaran vide SAMA secara lebih meluas.



Diluncurkan, video partisipatif pertama tentang disabilitas:

SAMA: Ruang, Peluang dan Perlakuan bagi Penyandang Disabilitas

Sejalan dengan peringatan Hari Internasional bagi Penyandang Disabilitas, ILO bekerja sama dengan Yayasan Kampung Halaman (YKH) menyelenggarakan serangkaian kegiatan kampanye berjudul “SAMA: Ruang, Peluang dan Perlakuan bagi Penyandang Disabilitas” di Jakarta, Surabaya, Semarang dan Yogyakarta. Program kampanye ini menggunakan video partisipatif dalam bentuk video diari mengenai akses pekerjaan dan fasilitas umum bagi para penyandang disabilitas.

Pembuatan video partisipatori ini melibatkan 19 penyandang disabilitas penglihatan, pendengaran dan fisik. Mereka terlibat dalam proses pelatihan dan pendampingan selama satu bulan pada bulan Oktober. Selama masa pelatihan dan pendampingan, para penyandang disabilitas secara mandiri mengidentifikasi pengalaman, kesulitan, harapan dan aspirasi mereka dengan menggunakan metode *video diary*.

“ILO percaya bahwa video partisipatori ini akan lebih meningkatkan kesadaran tentang disabilitas dan rasa prioritas masyarakat, khususnya di antara para pembuat kebijakan. ILO meyakini kesadaran semacam itu akan membantu memerangi stigma dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas serta perlindungan hak mereka atas pekerjaan dan fasilitas umum yang layak untuk mewujudkan partisipasi penuh dan sejajar penyandang disabilitas dalam segala bentuk kegiatan masyarakat,” ujar

Michiko Miyamoto, Wakil Direktur ILO di Indonesia, mengomentari peluncuran video partisipatori ini.

Lokakarya dimulai dengan mengidentifikasi persoalan dan tantangan yang dapat dikembangkan menjadi berbagai kisah. Bersama dengan para pendamping, beragam metode untuk mengidentifikasi permasalahan digunakan, seperti permainan peran, diskusi kelompok dan penelitian visual maupun non-visual. Dari identifikasi persoalan, lokakarya diteruskan dengan pengembangan cerita, pengenalan peralatan rekam audio visual dan proses produksi (perekaman adegan dan penulisan naskah).

Lokakarya ini juga melibatkan anggota keluarga, tempat kerja dan masyarakat sekitar untuk menyuarakan keprihatinan mereka terhadap persoalan yang dialami oleh penyandang disabilitas. “Selama lokakarya, peserta membuktikan beberapa stigma terhadap mereka itu salah. Peserta dengan gangguan penglihatan, contohnya, menunjukkan bakat mereka menggunakan kamera video. Walaupun mereka tidak dapat melihat, mereka memiliki komposisi rasa yang kuat melalui suara,” tambah Dian.

Kendati proses pembuatan *video diary* ini harus dilakukan secara intensif selama satu bulan, semangat dan antusiasme para peserta sangat tinggi.

Sementara Laura Wijaya, peserta dengan disabilitas pendengaran, menegaskan pentingnya pengakuan atas bahasa isyarat. “Melalui video-video ini, saya berharap masyarakat dapat lebih memahami pentingnya bahasa isyarat bagi orang dengan disabilitas pendengaran.” ❖



Keunikan video-video ini adalah para peserta dari berbagai bentuk disabilitas yang berbeda harus saling bekerja sama. Ini merupakan pengalaman yang luar biasa dan saya berharap video-video ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama para pembuat keputusan, tentang disabilitas

Yudhi Hermawan
peserta dengan disabilitas penglihatan

Mempromosikan Hak-hak Penyandang Disabilitas di Indonesia (UNPRPD)



Sekilas:

Pada tahun 2011, enam badan PBB (ILO, WHO, UNDP, OHCHR, UNICEF dan UN DESA) membentuk Kemitraan PBB mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas (UNPRPD)—sebuah dana perwalian multi-donor (MDTF)—untuk mendukung kerjasama antara badan-badan PBB di tingkat negara guna mempromosikan hak dan peluang para penyandang disabilitas. Tujuan dari UNPRPD adalah mengembangkan kapasitas para pemangku kepentingan nasional, khususnya pemerintah dan organisasi-organisasi penyandang disabilitas guna mendorong penerapan Konvensi PBB mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas (UNCPRD) dengan lebih efektif. Salah satu dari negara pelaksana pertama dari UNPRPD adalah Indonesia.

Kendati pemerintah Indonesia semakin menaruh perhatian terhadap hak-hak penyandang disabilitas, salah satunya melalui ratifikasi UNCPRD pada November 2011, masih terdapat kebutuhan untuk meningkatkan kesadaran atas hak-hak penyandang disabilitas, serta memperkuat pondasi kelembagaan disabilitas. Oleh karena itu, proyek ini akan memfokuskan diri pada penciptaan lembaga yang berkemampuan dan inklusif, serta mendukung Badan Pusat Statistik (BPS) memperkuat pengumpulan data terkait dengan disabilitas. Di Indonesia, proyek ini dilaksanakan bersama-sama oleh ILO, WHO, UNESCO dan UNFPA.

Didukung oleh:



Capaian Tahun 2013:

1. **Kemitraan dengan Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI)** untuk merekrut pelatih internal dari PPDI guna mendukung peningkatan kapasitas mengenai UNCRPD, baik untuk pejabat pemerintah dan organisasi-organisasi penyandang disabilitas.
2. **Serangkaian peningkatan kapasitas mengenai UNCRPD dan pengelolaan disabilitas di tempat kerja** bagi pejabat pemerintah di dinas ketenagakerjaan provinsi di Jawa Barat, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
3. **Serangkaian pelatihan untuk organisasi-organisasi penyandang disabilitas di wilayah Jakarta dan sekitarnya, Jawa Timur dan NTT** mengenai pendidikan keuangan, keterampilan komunikasi, negosiasi dan presentasi serta manajemen proyek.
4. **Pembuatan dua video partisipatif mengenai disabilitas berjudul "SAMA: Ruang, Peluang dan Perlakuan terhadap Penyandang Disabilitas",** bekerja sama dengan Yayasan Kampung Halaman. Video ini merupakan video partisipatif pertama yang dibuat dan diproduksi oleh penyandang disabilitas sendiri di Jakarta dengan menampilkan dua hak penting dari penyandang disabilitas: hak atas pekerjaan yang layak dan hak atas fasilitas umum. Menggunakan kata-kata, pilihan gambar mereka sendiri, video-video ini merekam keseharian, perjuangan, perjalanan dan harapan para penyandang disabilitas.



Rencana Tahun 2014:

1. Meningkatkan kembali kapasitas mengenai UNCRPD bagi organisasi-organisasi penyandang disabilitas di Jakarta. Ini mencakup pengenalan mengenai bagaimana menghadapi penggambaran media mengenai isu-isu disabilitas.
2. Mendukung pelatih internal PPDI dalam mengembangkan perencanaan strategis dan rencana kerja PPDI.
3. Mendukung kementerian untuk membentuk Dewan Penasihat untuk Isu Disabilitas (*Disability Advisory Committee*) guna mengawasi penerapan UNPRPD.

Program Pekerja Anak



Sekilas:

Pemerintah Indonesia telah mengembangkan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak pada 2002 melalui Keputusan Presiden No. 59/2002. Indonesia saat ini berada di tengah-tengah Rencana Aksi Nasional 20 tahun. Selama 10 tahun terakhir, pemerintah dan LSM telah berkolaborasi untuk menghapus pekerja anak di Indonesia. Saat ini diperkirakan terdapat empat juta anak berumur 5-17 tahun yang bekerja; dengan 1,4 juta anak berusia di bawah 13 tahun terlibat dalam pekerjaan, hampir 650.000 (13-14 tahun) anak melakukan pekerjaan ringan dan dua juta anak berusia 15-17 tahun bekerja dalam kondisi yang membahayakan.

Pada tahun 2012, ILO melaksanakan sebuah proyek global untuk mengentaskan pekerja anak melalui pendidikan yang bertujuan memperkuat keterkaitan di tingkat kebijakan antara bidang pekerja anak dan pendidikan, yang mengarah pada tindakan yang akan meningkatkan kesempatan bagi pekerja anak ataupun yang rentan menjadi pekerja anak untuk mendapatkan manfaat dari pendidikan. Didanai Kementerian Luar Negeri Pemerintah Belanda, proyek ini dilakukan di empat negara dan salah satunya adalah Indonesia. Dijalankan pada September 2011, proyek ini diterapkan di tiga lokasi: Jakarta dan sekitarnya, Sukabumi dan Makassar hingga akhir tahun 2014.

Selanjutnya, pada 2013 ILO juga memperoleh dukungan dari Aksi Global mengenai Pekerja Anak yang dijalankan di 41 negara dan Indonesia merupakan salah satu negara sasaran dari program tersebut. Proyek ini didanai Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat.

Didukung oleh:



Capaian Tahun 2013:

1. **Peningkatan kualitas layanan pendidikan bagi 100 anak jalanan di empat pusat pendidikan komunitas di Jakarta** dengan menyediakan pelatihan untuk 30 pembimbing dan 60 pekerja sosial mengenai metode pembelajaran yang menyenangkan serta pendidikan kecakapan hidup menggunakan modul 3R-ILO pelatihan (hak, tanggung jawab dan keterwakilan). Peningkatan kualitas ini dilakukan melalui kerjasama dengan Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI).
2. **Pelatihan keterampilan kejuruan bagi anak-anak jalanan yang lebih tua untuk membekali mereka dengan keterampilan yang lebih baik**, bekerja sama dengan Kementerian Sosial di bawah Skema Perlindungan Sosial untuk Kesejahteraan anak (Program Kesejahteraan Sosial Anak/PKSA).

3. **Program pelatihan keterampilan kejuruan tingkat menengah bagi 40 pemulung anak di tempat pembuangan sampah Antang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.** Fokus program ini adalah pelatihan otomotif dan menjahit, program magang serta pelatihan dasar keterampilan kewiraswastaan dilakukan dengan kolaborasi bersama Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan. Atas kesuksesan program ini, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan mengalokasikan dana untuk pelatihan bagi 50 pekerja anak lainnya.

4. **Peningkatan keterampilan pribadi dan sosial terhadap 750 anak di 11 sekolah satu atap** melalui program pra-kejuruan di Kabupaten Sukabumi. Program ini dilaksanakan melalui kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

5. **Komitmen Regional dalam menentang pekerja anak melalui lokakarya kerjasama Selatan-Selatan di Jakarta**, bersama dengan lima negara tetangga (Kamboja, Laos, Filipina, Vietnam dan Timor-Leste). Kerjasama



Rencana Tahun 2014:

1. Melanjutkan dukungan terhadap Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi untuk menyediakan program keterampilan pra-kejuruan bagi 300 anak-anak di 10 sekolah satu atap terpilih. Universitas Pendidikan Indonesia juga akan terlibat dalam program ini untuk memperkuat pelatihan para guru, pengembangan modul serta mengkaji efektivitas program guna mencegah anak-anak berhenti sekolah dan menjadi pekerja anak.
2. Melanjutkan dukungan terhadap pemerintah Indonesia dalam melakukan langkah-langkah percepatan penghapusan pekerja anak di Indonesia pada 2022.
3. Melanjutkan dukungan terhadap Yayasan Mitra Imadei untuk memperkuat keterampilan kejuruan bagi 50 pekerja rumah tangga anak usia antara 15-17 tahun di daerah Kabupaten Bekasi dan Tangerang.

Capaian Tahun 2013: (lanjutan):

tersebut mengidentifikasi kemajuan yang terjadi serta tantangan yang dihadapi untuk memastikan percepatan aksi pengentasan pekerja anak di tingkat regional.

6. Penyusunan dan adopsi panduan mengenai Pengarusutamaan Pekerja Anak dalam Perencanaan dan Program Sektor Pendidikan.

Panduan ini diujicoba di Provinsi Jawa Barat melalui kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat dan Save the Children.

7. Penerapan kampanye mengenai pekerja rumah tangga anak melalui pertunjukan teater oleh para pekerja rumah tangga anak berjudul "Mutiar Retak Dibalik Kain Pel" di Jakarta. Pertunjukan tersebut diselenggarakan sejalan dengan peringatan Hari Dunia Menentang Pekerja Anak pada 12 Juni dengan tema "Katakan Tidak pada Pekerja Anak dalam Pekerjaan Rumah Tangga."

8. Penerbitan dan peluncuran publikasi pekerja anak ILO berjudul, "20 Tahun Penanggulangan Pekerja Anak di Indonesia". Publikasi ini memperlihatkan aktivitas dan aksi yang dilakukan ILO dan para mitranya untuk mengatasi masalah pekerja anak di Indonesia sejak tahun 1992. Publikasi tersebut juga mendokumentasikan inisiatif yang diambil, kemajuan yang



9. Penyelesaian sejumlah penelitian mengenai pekerja anak, antara lain:

- 1) *Analisa Makro dan Kajian Cepat Situasional mengenai Pekerja Rumah Tangga Anak di Indonesia: Studi Kasus Jakarta dan Wilayah Sekitar* (dilaksanakan Pusat Kajian
- 2) *Perlindungan Anak (PUSKAPA UI);*
- 2) *Ulasan mengenai Mekanisme dan Pelaksanaan Praktik Hukum pada Kasus-kasus terkait Pekerja Anak dan Kerja Paksa di Indonesia (dilaksanakan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PHSKI));* dan
- 3) *Survei untuk Memperkirakan Eksploitasi Seks Komersial pada Anak di Wilayah Bekasi, Jawa Barat.*

Ketika PRTA Menampilkan Drama “Mutiara Retak di Balik Kain Pel”

*“Ingin sekali aku meneruskan sekolah
Tapi apa daya, tak semua sekolah gratis
Dengan terpaksa, aku kerja jadi PRT
Walau sebenarnya, aku tak ingin seperti ini*

*Tak ada yang gratis di dunia ini
Semua butuh perjuangan dan pengorbanan
Demi tetap bertahan hidup*

*Jangan bersedih
Tetaplah tersenyum di balik kepahitan
hidup ini
Aku yakin aku tak sendiri
Jangan pernah patah arang
Masa depan yang cerah tetap setia
menungguku”*

Sekitar 15 pekerja rumah tangga anak (PRTA) berusia 15-17 tahun, laki-laki dan perempuan, menyanyikan bersama lagu pembuka di atas panggung dalam pertunjukan drama musikal 45 menit tentang PRTA berjudul “Mutiara Retak di Balik Kain Pel”. Lebih dari 150 orang tamu undangan pun dibuat terpesona oleh adegan, dialog dan emosi yang ditampilkan anak-anak ini dengan cara yang serius dan humoris. Para penonton mampu merasakan harapan, impian, kesedihan dan perjuangan hidup mereka sebagai PRTA.

Pertunjukan drama yang ditampilkan pada 18 Juni 2013 di Erasmus Huis, Jakarta ini diselenggarakan oleh ILO dan Mitra Imadei, serta didukung oleh Kedutaan Besar Kerajaan



Belanda di Indonesia. Pertunjukan ini diselenggarakan bertepatan dengan peringatan Hari Dunia Menentang Pekerja Anak yang jatuh 12 Juni, dengan tema Katakan Tidak pada Pekerja Anak dalam Pekerjaan Rumah Tangga.

Pertunjukan ini dimaksudkan selain untuk menyuarakan kehidupan dan nasib PRTA, juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan serta perlindungan anak-anak agar mereka dapat memperoleh pekerjaan yang lebih baik di kala dewasa nanti sehingga mampu memperoleh kehidupan yang lebih sejahtera. Pertunjukan ini didukung para bintang tamu yang memiliki perhatian besar pada masalah PRTA seperti Imada (gitaris), Ninik L. Karim (aktris) dan Haryo Pramoe (koki profesional).

Sutradara Herlina Syarifuddin mengatakan, anak-anak ini sudah berlatih sejak Desember tahun lalu. “Kami berusaha sebaik mungkin mencari tempat dan waktu yang tepat untuk latihan. Yang luar biasa adalah anak-anak ini selalu membawa energi dan semangat untuk terus berlatih meski baru saja selesai bekerja berjam-jam lamanya,” terangnya.

“Melalui pertunjukan oleh para PRTA ini, ILO mengambil pendekatan advokasi yang berbeda terkait masalah pekerja anak dan pendidikan, terutama PRTA. Kami berharap melalui dialog dan drama ini, para penonton dapat mengubah cara mereka memperlakukan PRT di rumah, termasuk bagaimana mereka dapat membantu mencegah anak-anak agar tidak terlibat dalam pekerjaan rumah tangga,” kata Dede Sudono, Koordinator Program Pekerja Anak dan Pendidikan ILO. ❖

Program HIV dan AIDS di Tempat Kerja



Sekilas:

Sejak diluncurkannya Kaidah ILO mengenai HIV dan AIDS dan Dunia Kerja, sejumlah program dan kebijakan terkait telah diperkenalkan, termasuk dikeluarkannya keputusan menteri pada tahun 2004; penerapan program-program wirausaha secara nasional; serta sejumlah prakarsa percontohan untuk meningkatkan keterampilan kewirausahaan pada orang dengan HIV. Pada Juni 2010, ILO mengadopsi Rekomendasi No. 200 mengenai HIV dan AIDS dan Dunia Kerja. Rekomendasi-rekomendasi tersebut merupakan standar internasional pertama dan satu-satunya mengenai HIV dan hak asasi manusia serta merupakan instrumen normatif yang memberikan pedoman mengenai penerapan inisiatif-inisiatif HIV di tempat kerja. Prioritas utama program ini di Indonesia adalah memastikan inisiatif dasar perlindungan sosial di bawah kerangka kerja hukum jaminan sosial yang baru akan mencakup orang dengan HIV. Berbagai inisiatif tersebut juga ditingkatkan di sektor-sektor yang terbukti lebih rentan terhadap tingginya prevalensi HIV di antara para pekerja, termasuk sektor-sektor terkait sumber daya alam, transportasi jarak jauh, baik darat dan laut serta industri hiburan.

Capaian Tahun 2013:

1.

**Dukungan terhadap
Persiapan Gugus Tugas Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan (BPJS 1) mengenai
Jaminan Kesehatan Nasional di
bawah Komisi Nasional AIDS
(KPA) dalam mengadvokasi isu
HIV ke dalam BPJS, melalui**

pertemuan-pertemuan koordinasi rutin yang melibatkan lembaga-lembaga pemerintah, PT. Jamsostek, PT. Askes, jaringan penderita HIV dan populasi kunci yang terdampak lainnya. Pertemuan-pertemuan rutin ini telah meningkatkan komitmen

Capaian Tahun 2013: (lanjutan):

para pemangku kepentingan untuk memperkuat kerjasama melalui pemberian masukan-masukan bagi pemerintah mengenai pengintegrasian HIV dan AIDS dalam BPJS 1.

2. **Sosialisasi nasional mengenai BPJS 1 sebagai bagian dari dialog kebijakan organisasi masyarakat sipil yang melibatkan jaringan orang dengan HIV dan populasi kunci yang terdampak lainnya dari 33 provinsi.** Sosialisasi tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman mengenai permasalahan perlindungan sosial terutama tentang dimasukkannya isu HIV dan AIDS dalam penerapan BPJS 1 dan menghasilkan sejumlah strategi pendampingan komunitas mengenai perlindungan sosial yang sensitif terhadap isu HIV.

3. **Penyelesaian penelitian ILO mengenai Akses dan Dampak Program Perlindungan Sosial terhadap Pekerja Perempuan dan Laki-Laki di Perekonomian Informal yang Terkena HIV dan Rumah Tangga Mereka,** sebagai bagian dari penelitian global ILO yang diprakarsai oleh ILO AIDS. Penelitian tersebut bertujuan menilai tingkat akses serta efek positif maupun negatif dari program serta kebijakan perlindungan sosial, terutama perlindungan kesehatan sosial dan dukungan pendapatan bagi pekerja perempuan dan laki-laki di perekonomian informal yang terkena HIV atau AIDS dan rumah tangga mereka. Penyelesaian penelitian ini dilanjutkan dengan lokakarya validasi tripartit untuk memperoleh berbagai masukan dan rekomendasi secara lebih lanjut.

4. **Dukungan terhadap Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk berkoordinasi dengan Kelompok Kerja Dunia Kerja dalam penulisan ulang Modul Pelatihan untuk Pelatih (ToT) bagi Program HIV di Tempat Kerja** dan pengembangan rancangan pedoman Sertifikasi Pelatihan HIV di Tempat Kerja, yang menghasilkan rancangan akhir Modul ToT bagi Program HIV di Tempat Kerja dan rancangan pedoman Sertifikasi Pelatihan HIV di Tempat Kerja.

5. **Peluncuran Inisiatif VCT@ Work di Indonesia yang secara simultan dilaksanakan di Jakarta dan Surabaya, termasuk kedua pelabuhan terbesar dan paling aktif, Tanjung Priok dan Tanjung Perak,** sebagai bagian dari peringatan Hari AIDS Sedunia tahun 2013. Sejak Oktober hingga Desember 2013, inisiatif-inisiatif Konseling dan Pemeriksaan Sukarela di Tempat Kerja (VCT@ WORK) telah dilaksanakan di DKI Jakarta, Jawa Barat, Sulawesi Tenggara dan Bengkulu, dengan melibatkan partisipasi 2.500 pekerja dalam inisiatif VCT serta 10.000 pekerja mendapatkan informasi mengenai VCT dan bagaimana cara memperoleh bantuan.

Rencana Tahun 2014:

1. Mendukung organisasi masyarakat madani dalam mengawasi integrasi HIV ke dalam Dewan Jaminan Sosial Nasional mengenai Kesehatan (BPJS 1) dan memastikan bahwa orang dengan HIV dan kelompok masyarakat rentan lainnya diberikan akses kepada skema kesehatan universal yang akan dijalankan pada tahun 2014.
2. Terus menerapkan inisiatif-inisiatif VCT@Work dengan para konstituen ILO dan mitra-mitra sosial lainnya di Provinsi Kalimantan Timur dan Papua, dengan fokus di daerah-daerah pertambangan yang memiliki kerentanan HIV tinggi. Pada 2014, program inisiatif ini akan bermitra dengan dinas kesehatan dan dinas tenaga kerja, Asosiasi Industri Tambang, asosiasi pengusaha, LSM lokal, jaringan orang dengan HIV, dan Koalisi Bisnis Indonesia mengenai AIDS. Diperkirakan 650.000 pekerja perempuan dan laki-laki akan memperoleh pencegahan dan informasi rujukan VCT, sementara 130.000 pekerja lainnya akan mempergunakan jasa VCT dan mengetahui status mereka di akhir tahun nanti.

Kampanye VCT@Work di Indonesia

International Labour Organization

“We all need to know our HIV status. Even if one is HIV positive, it is not the end of the life. **With treatment, people can live a long healthy and productive life.** I welcome the VCT@Work initiative and encourage all to join it.”

“Setiap orang perlu mengetahui status HIV-nya. Meski seseorang diketahui berstatus HIV positif, bukan berarti hal tersebut merupakan akhir dari segalanya. **Dengan pengobatan, orang dengan HIV dapat menjalani kehidupan yang panjang, sehat, dan produktif.** Saya menyambut baik inisiatif VCT@Work dan menghimbau keikutsertaan seluruh pihak.”

Ibu Hj. Ani Bambang Yudhoyono
First Lady of Indonesia, HIV and AIDS Ambassador
Ibu Negara Republik Indonesia, Duta HIV dan AIDS

www.ilo.org/zero

International Labour Organization

“We are committed to protecting the safety and health of our workers, including from HIV-AIDS. Therefore I encourage every workers who feels that they are at risk to immediately undergo HIV testing through voluntary counselling and testing for workers or VCT@Work. **Through VCT we can improve our health, workers' productivity, and also prevent further transmissions.** Let's support VCT@Work to achieve zero new HIV infections, zero discrimination, and zero AIDS-related death for workers.”

“Kami berkomitmen untuk melindungi keselamatan dan kesehatan pekerja termasuk dari HIV-AIDS. Untuk itu saya menghimbau kepada seluruh pekerja yang merasa berisiko untuk segera mengikuti tes HIV melalui konseling dan testing sukarela bagi pekerja atau VCT@Work. **Dengan VCT dapat meningkatkan kesehatan dan produktivitas pekerja serta mencegah penularan selanjutnya.** Mari kita dukung VCT@Work untuk mencapai zero infeksi baru, zero diskriminasi dan zero kematian akibat AIDS pada pekerja.”

Drs. H. A Muhaimin Iskandar, MSI
Minister of Manpower and Transmigration Republic of Indonesia
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia

www.ilo.org/zero

International Labour Organization

“The majority of Sexually Transmitted Diseases, including HIV, occur during the productive age. Knowing the HIV status and starting the ARV treatment as soon as possible can prevent the occurrence of a more severe disease. HIV testing is the only way to know one's HIV status. Do not worry, the results are kept confidential. Pre and post test counseling are also available. **Let's take the test through VCT@Work initiative as a step towards reaching the three zeros; zero new HIV infections, zero discrimination, and zero AIDS-related deaths.**”

“Sebagian besar Infeksi Menular Seksual, termasuk HIV, terjadi pada usia produktif. Mengetahui status HIV dan memulai pengobatan ARV sedini mungkin dapat mencegah terjadinya penyakit yang lebih berat. Tes HIV satu-satunya cara untuk mengetahui status HIV. Jangan khawatir, hasil tes terjaga kerahasiaannya. Layanan konseling sebelum dan sesudah tes juga tersedia. **Lakukanlah tes melalui inisiatif VCT@Work yang merupakan sebuah langkah menuju tercapainya tiga zero; zero infeksi baru HIV, zero diskriminasi, dan zero kematian akibat AIDS.**”

Dr. Nafisah Mboi, SpA. M.P.H
Minister of Health Republic of Indonesia
Menteri Kesehatan Republik Indonesia

www.ilo.org/zero

Aksi Tripartit untuk Melindungi dan Mempromosikan Hak Pekerja Migran di Kawasan ASEAN (Proyek ASEAN Triangle)



Sekilas:

Dalam beberapa tahun terakhir, jalur migrasi kerja dari dan dalam wilayah Asia Tenggara telah meningkat dari segi volume dan kompleksitas. Tren ini terkait dengan sejumlah faktor, termasuk perubahan demografis, kesenjangan upah, keselamatan manusia, terbentuknya jaringan pekerja migran serta membaiknya sarana transportasi. Kendati para pekerja migran memberikan kontribusi besar bagi pembangunan baik negara asal maupun tujuan, banyak di antara mereka terutama yang tidak memiliki kejelasan status mengalami pelanggaran hak sebagai manusia dan pekerja.

Tidak ada cara pendekatan unilateral yang efektif dan efisien terhadap pengaturan migrasi pekerja internasional. Langkah-langkah yang diambil oleh negara asal memiliki konsekuensi mendasar di negara-negara tujuan dan sebaliknya. Ini terutama dikarenakan banyaknya kesamaan tantangan yang dihadapi para pekerja migran (baik perempuan dan laki-laki), penyedia pelayanan dan pemerintah di seluruh wilayah.

Proyek ILO-ASEAN TRIANGLE didanai oleh CIDA Kanada dan bertujuan mengurangi eksploitasi pekerja migran di wilayah ASEAN secara signifikan melalui peningkatan jaminan hukum dan keselamatan migrasi serta perlindungan kerja. Proyek ini mendukung pendekatan-pendekatan bilateral dan regional untuk mengatasi permasalahan bersama, yakni membuat regionalisme lebih efektif, serta meningkatkan kapasitas institusi-institusi terkait di ASEAN. Tujuan proyek sejalan dengan prioritas strategi Program Kerja Menteri Tenaga Kerja ASEAN (2010-2015).

Didukung oleh: 

Capaian Tahun 2013:

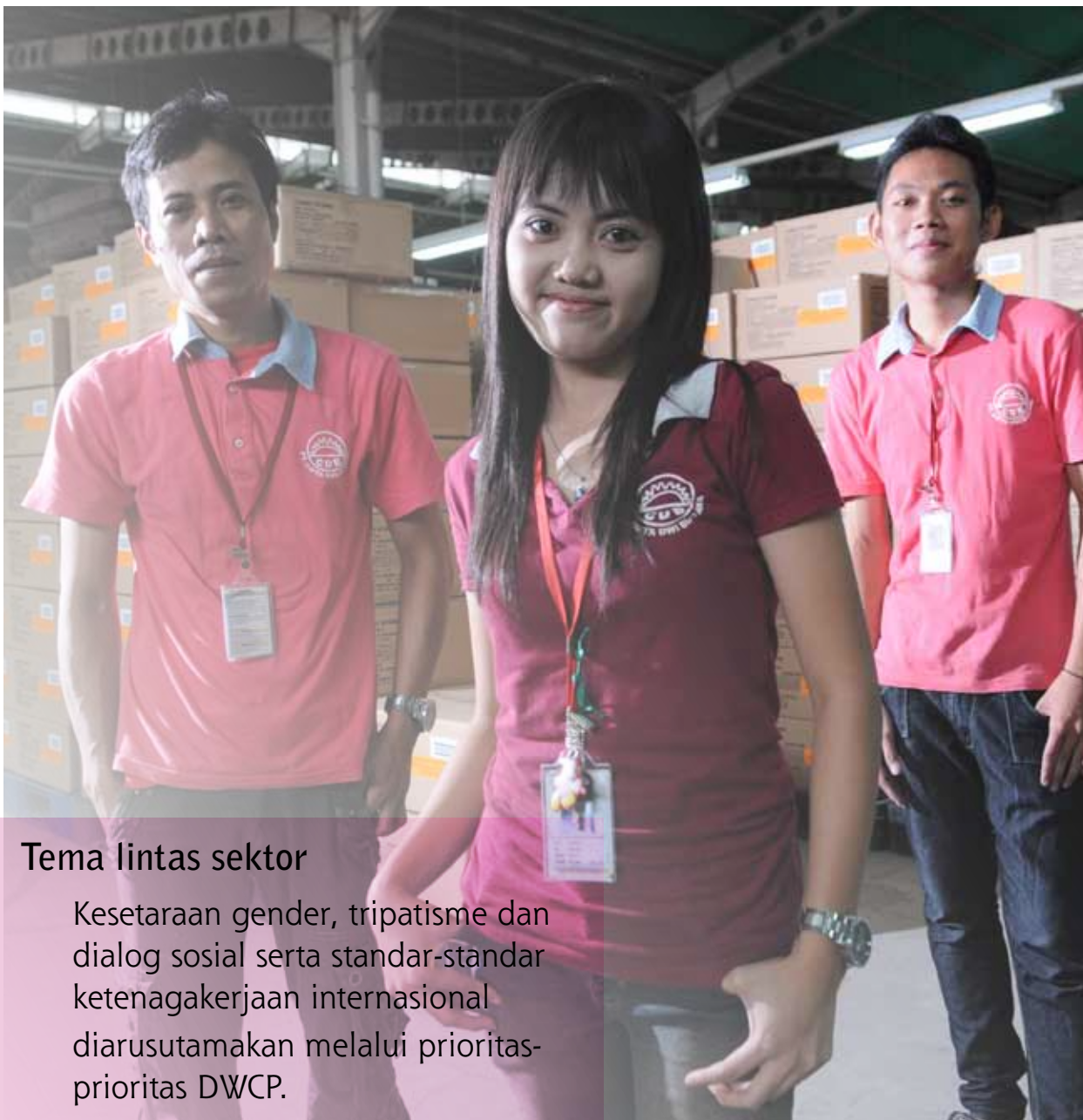
1. **Peningkatan pengetahuan dasar dan saling berbagi informasi mengenai praktik-praktik yang baik untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja migran** di antara para pemangku kepentingan terkait di bawah pimpinan negara-negara anggota ASEAN serta negara-negara yang menjadi tempat tujuan pekerja ASEAN melalui penyelenggaraan lokakarya regional selama dua hari mengenai pekerjaan di sektor perikanan.
2. **Bantuan terhadap pemerintah Indonesia dalam mempersiapkan partisipasi Indonesia di Forum Pekerja Migran ASEAN ke-6 (6th AFML) di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam.** Bantuan diberikan dalam bentuk lokakarya untuk memperkuat kapasitas para pemangku kepentingan Indonesia dari badan pemerintahan, serikat pekerja dan pengusaha serta kelompok masyarakat sipil.

3. **Partisipasi di Forum Pekerja Migran ASEAN ke-6 di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam.** Forum ini merupakan pertemuan tahunan yang menghadirkan perwakilan-perwakilan pemerintah, organisasi pekerja dan pengusaha serta kelompok masyarakat sipil dari negara-negara anggota ASEAN untuk berdiskusi mengenai isu-isu terkait perlindungan hak-hak pekerja migran di wilayah ASEAN. Pada 2013, Forum ini memilih tema "Data serta Mekanisme Pengaduan" dengan tajuk: "Memperbaiki Kebijakan dan Perlindungan terhadap Pekerja Migran melalui Berbagi Data dan Akses yang Memadai terhadap Sistem Hukum dan Pengadilan kepada Pekerja Migran selama Masa Kerja, termasuk Mekanisme Pengaduan."



Rencana Tahun 2014:

1. Mengadakan sejumlah aktivitas yang terkait gender dalam migrasi kerja, termasuk promosi jabatan serta perlindungan hak pekerja rumah tangga migran.
2. Mendukung Sekretariat ASEAN untuk mengadakan Forum Pekerja Migran ASEAN ke-7 di Myanmar.



Tema lintas sektor

Kesetaraan gender, tripatisme dan dialog sosial serta standar-standar ketenagakerjaan internasional diurusutamakan melalui prioritas-prioritas DWCP.

Akses terhadap Pekerjaan dan Pekerjaan Layak bagi Perempuan (MAMPU)



Sekilas:

Proyek ILO-MAMPU mendukung pemberdayaan ekonomi dan sosial pekerja perempuan melalui berbagai strategi untuk memperkuat akses serta keterlibatan yang adil dalam pekerjaan formal dan pekerjaan layak di Indonesia. Intervensi utama proyek ini meliputi : 1) membimbing perencanaan, penerapan dan evaluasi kegiatan percontohan serta pendekatan untuk memperbaiki kondisi perempuan di dalam lingkungan pekerjaan serta akses mereka terhadap pekerjaan; 2) memberikan dukungan peningkatan kapasitas lembaga terhadap mitra-mitra proyek, termasuk kementerian terkait agar dapat lebih memahami dan merespons masalah diskriminasi dalam pekerjaan serta hambatan yang dihadapi perempuan dalam pekerjaan; dan 3) melakukan penelitian dan analisis perbandingan terhadap praktik-praktik nasional di lingkungan kerja untuk menyusun kebijakan yang responsif dan berdasarkan bukti, serta saran dan perencanaan program bagi mitra-mitra proyek.

Didukung oleh:



Capaian Tahun 2013:

Peningkatan kesadaran

1. **Pelaksanaan berbagai lokakarya peningkatan kesadaran terhadap pekerja rumahan** tingkat nasional

serta provinsi dan kabupaten di wilayah Jawa Timur dan Sumatera Utara untuk konstituen tripartit.

2. **Penerapan kampanye media mengenai kesetaraan gender dalam lingkungan kerja** melalui pelatihan media dan beasiswa media. Dalam program beasiswa media, enam jurnalis terpilih

menerbitkan enam buah liputan mendalam mengenai diskriminasi terhadap perempuan di lingkungan kerja dalam bentuk media cetak maupun elektronik.

Pembangunan kapasitas

1. **Bekerja sama dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dua pedoman telah disusun dan diterbitkan:**

- 1) *Panduan Praktik yang Baik untuk Mempekerjakan Pekerja Rumahan bagi Pengusaha;* dan

- 2) *Kesetaraan dan Non-Diskriminasi di Tempat Kerja di Indonesia: Panduan.*

2. **Perancangan dan pelaksanaan program pelatihan bagi organisasi serta serikat pekerja yang mengorganisasi pekerja rumahan;** mengenai Pengorganisasian Pekerja Rumahan; Sadar Hukum bagi Pekerja Rumahan; serta Penyuluhan dan Kepemimpinan bagi Pekerja Rumahan .

Rencana Tahun 2014:

1. Memperluas aktivitas ke organisasi dan perwakilan pekerja rumahan di Jawa Tengah, Yogyakarta, Jakarta dan Sumatera Utara bersama LSM dan serikat pekerja.
2. Melakukan konsolidasi produk pengembangan kapasitas dan bantuan teknis untuk mendukung organisasi dan perwakilan LSM dan serikat pekerja mengenai hak dan kepentingan para pekerja rumahan.
3. Melakukan percontohan forum dialog sosial secara lokal bagi pekerja rumahan.
4. Menyediakan bantuan teknis bagi konstituen tripartit untuk mengembangkan kebijakan mengenai industri rumahan dan meningkatkan upah minimum serta jaminan sosial bagi pekerja rumahan.
5. Mengembangkan dan melaksanakan kegiatan percontohan dengan para pengusaha untuk meningkatkan kondisi kerja para pekerja rumahan.
6. Memberikan kontribusi atas pemahaman yang lebih baik serta kesadaran mengenai industri rumahan di Indonesia melalui penelitian mengenai kondisi praktik industri rumahan di skala nasional serta peningkatan kesadaran mengenai isu tersebut.
7. Melakukan konsolidasi dan memperluas program percontohan penghidupan di 14 kecamatan di Sumatera Utara dan Jawa Timur, termasuk pembentukan 14 fasilitas penitipan anak berbasis komunitas.
8. Mendukung Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk meningkatkan program pelatihan berdasarkan kompetensi skala nasional bagi penyedia layanan pengembangan bisnis dengan menggunakan produk-produk pelatihan ILO, termasuk Memulai dan Meningkatkan Usaha Anda (SIYB).
9. Menyediakan bantuan teknis kepada Biro Pusat Statistik (BPS) untuk memperkuat pengumpulan dan pengelolaan data terhadap kelompok pekerja yang rentan dan informal.
10. Menyediakan bantuan teknis kepada pemerintah untuk meningkatkan kondisi lingkungan bagi para pengusaha perempuan untuk mengembangkan usahanya.

Capaian Tahun 2013: (cont):

3. Pelaksanaan kajian kebutuhan kelembagaan yang diperlukan bagi serikat pekerja dan Mitra Wanita Pekerja Rumahan (MWPRI) untuk memahami keterbatasan kapasitas mereka,

4. Pelatihan terhadap pengorganisasian pekerja rumahan yang diterapkan bagi serikat-serikat pekerja di tingkat nasional serta provinsi di Jawa Timur dan Sumatera Utara.

5. Penyusunan materi-materi pelatihan bagi para pengawas ketenagakerjaan mengenai kerja rumahan.

6. Membangun kapasitas kelembagaan organisasi pekerja rumahan (MWPRI) dalam manajemen keuangan dan manajemen berdasarkan hasil, termasuk pengelolaan data survei dan diskusi kelompok, rancangan dan perencanaan program, serta pelaporan teknis dan keuangan.

7. Pengembangan dan penerapan pelatihan bagi fasilitator mata pencarian mengenai penitipan anak berbasis komunitas, kesetaraan gender dan pengembangan usaha bagi perempuan.

8. Adaptasi dan penerapan program Pengembangan Usaha Berbasis Komunitas bagi para

pengusaha perempuan di Jawa Timur dan Sumatera Utara.

9. Pengembangan paket pelatihan keuangan bagi pekerja rumahan perempuan.

10. Pembangunan kapasitas tiga penyedia layanan pengembangan bisnis mengenai program pelatihan usaha ILO (Memulai dan Meningkatkan Usaha Anda/SIYB serta Pengembangan Usaha berbasis Gender/GET Ahead) di Sumatera Utara.

Bantuan teknis

1. Kajian kerangka kerja hukum nasional dan pengembangan rekomendasi kebijakan pembangunan untuk melindungi pekerja rumahan berdasarkan Konvensi ILO No. 177 mengenai Kerja Rumahan (1996). Menyediakan contoh-contoh praktik terbaik internasional untuk Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

2. Penyusunan pedoman penilaian tingkat pemenuhan kewajiban pengusaha terhadap pekerja rumahan.

3. Penelitian mengenai pengembangan jaminan sosial yang responsif bagi pekerja rumahan.

4. Penelitian terhadap biaya dan manfaat formalisasi bagi para pengusaha perempuan di tingkat usaha mikro dan kecil.

5. Memetakan dan meneliti karakteristik hubungan kerja dan kondisi kerja para pekerja rumahan di Jawa Timur.

Percontohan

1. Penerapan program percontohan untuk mengorganisasi pekerja rumahan di 15 daerah di Jawa Timur.

2. Pengembangan dan penerapan program percontohan terkait mata pencarian yang mereplikasi modalitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di 14 kecamatan (masing-masing tujuh di Jawa Timur dan Sumatera Utara) untuk mendukung peningkatan kapasitas pengusaha perempuan dan pembangunan layanan penitipan anak berbasis komunitas.

3. Penerapan pelatihan pengembangan usaha bagi pengusaha perempuan di 14 kecamatan.

4. Pengembangan survei dasar dan pengumpulan data untuk program-program proyek

Pelapis Voucher: Nasib Para Pekerja Rumahan

Keramaian masih terasa di lorong-lorong sempit kawasan Jati Bunder, Tanah Abang sesuai magrib malam itu. Sebagian warga asyik ngobrol dan bercengkrama di teras rumah, sambil menonton orang lalu lalang di kawasan padat penduduk itu. Di sebuah rumah sempit, dua orang perempuan asyik di depan TV 21 inch. Tuti (54) dan Teti (43) melepas lelah se usai kerja hari ini. Seperti ibu-ibu rumah tangga umumnya sinetron jadi hiburan utama mereka. Sese kali mereka tertawa, sese kali merenggut, larut dalam alur cerita opera sabun itu.

Tapi tak seperti ibu-ibu rumah tangga lainnya, Tuti dan Teti tak sekedar menonton. Sambil menatap layar kaca, tangan-tangan terampil mereka tetap bergerak melipat satu-satu kartu voucher perdana sebuah operator telekomunikasi. Sese kali perhatian mereka teralih, menarik potongan-potongan kertas dari tumpukan yang belum dilipat. Sese kali juga mereka mengikat dan menyusun kartu-kartu yang sudah dilipat dalam kotak-kotak kayu di hadapan mereka.

“Yah kerjanya santai, mas bisa sambil nonton atau layanin pembeli,” ujar Tuti yang juga membuka kios kelontong kecil di depan rumah mereka. Sehari sebelumnya Tuti dan Teti mendapatkan borongan melipat 8.000 kartu Telkomsel.

“*Biasanya order datangnya sore jam empat, lalu setelah magrib dan santai, kita mulai melipat sampai malam jam 9. Jika belum selesai ya kita lanjutkan besok paginya, dan disetor jika sudah tuntas kita. Tak ada target harus selesai sekian.*”

Kakak beradik Tuti dan Teti adalah satu di antara 702 pekerja rumahan di Kelurahan Kebon Melati, Tanah Abang. Selain melipat bungkus kartu voucher perdana Telkomsel, LSM Homenet Indonesia mencatat warga di RW 14, kelurahan Kebon Melati juga bekerja di rumah mereka memasang payet kerudung dan gesper tali bra. Seingat Tuti sendiri ada 150 orang ibu-ibu dan perempuan muda pelipat kartu voucher perdana operator Telkomsel di RW 14 Kelurahan Kebon Melati Tanah Abang.

ILO mendefinisikan pekerja rumahan sebagai mereka yang melakukan pekerjaan di rumah atau di tempat lain di luar tempat kerja pemberi kerja untuk menghasilkan produk atau jasa

yang secara khusus diminta pemberi kerja untuk mendapatkan upah. Dalam praktiknya, banyak pekerja rumahan tidak mendapatkan bayaran atas peralatan yang mereka gunakan, menerima upah berdasarkan sistem penjumlahan produk secara satuan atau berdasarkan volume pekerjaan. Mereka seringkali bekerja hanya berdasarkan perjanjian lisan dan tidak punya posisi tawar untuk turut menentukan upah. ❖

Adaptasi kutipan dari artikel mengenai pekerja rumahan perempuan di Jakarta yang ditulis oleh Agustinus Da Costa dari Koran Kontan. Artikel tersebut diterbitkan oleh Kontan pada 31 Mei 2013 dan merupakan bagian dari basiswa media ILO mengenai Diskriminasi terhadap Perempuan di Tempat Kerja yang dilakukan oleh Proyek ILO-MAMPU. Artikel selengkapnya dapat diakses melalui: <http://www.ilo.org/jakarta/info/public/fs/llang-en/index.htm>

Program Pengarusutamaan Gender (GMP)



Sekilas:

Mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan ekonomi perempuan di dunia kerja merupakan tanggung jawab seluruh konstituen ILO. Melanjutkan program yang dilaksanakan di berbagai fase berbeda program kemitraan Nowergia/ILO pada periode 2008-2011, program pengarusutamaan gender (GMP) terfokus pada upaya memastikan semua kegiatan di bawah kemitraan Nowergia/ILO terarusutamakan secara gender: Misalnya "kepentingan perempuan dan laki-laki menjadi bagian terpadu setiap kegiatan ILO di Indonesia dari tahap perancangan, penerapan, pemantauan hingga evaluasi agar setiap perempuan dan laki-laki secara setara mampu memperoleh manfaat dan mengakhiri praktik ketidaksetaraan. Tujuan dari proyek GMP di Indonesia ini adalah memastikan tujuan dan hasil dari proyek ini disusun dengan mempertimbangkan aspek gender di Indonesia.

Didukung oleh:



Capaian Tahun 2013:

1. **Pengembangan modul pelatihan bagi para pengawas ketenagakerjaan mengenai "Pengawasan Ketenagakerjaan dan Kesenjangan Gender"**, termasuk penyelenggaraan pelatihan untuk pelatih bagi pengawas ketenagakerjaan terkait.
2. **Penyusunan Pedoman Kesenjangan Upah** untuk perusahaan.
3. **Penyelenggaraan pelatihan lokakarya di tingkat provinsi** bagi para pemimpin pekerja rumah tangga dan pemimpin serikat pekerja, dengan menggunakan panduan pelatihan baru mengenai pekerjaan layak bagi pekerja rumah tangga yang diadaptasi untuk Indonesia.
4. **Pelaksanaan advokasi atas ratifikasi Konvensi No. 189 mengenai Pekerjaan Layak bagi Pekerja Rumah Tangga**, dan kerangka kerja peraturan perundangan nasional berdasarkan hak pekerja untuk menjamin hak-hak pekerja rumah tangga.

Rencana Tahun 2014:

- ♦ Melaksanakan pelatihan lokakarya di tingkat provinsi mengenai Kesenjangan Gender di Tempat Kerja di Nusa Tenggara Timur (NTT)



Publikasi Utama



Tren ketenagakerjaan dan sosial di Indonesia 2013: Memperkuat peran pekerjaan layak dalam kesetaraan pertumbuhan

ISBN: 978-92-2-028247-2

Edisi keenam, dari Tren Ketenagakerjaan dan Sosial di Indonesia difokuskan pada upaya untuk memperkuat peran pekerjaan layak dalam kesetaraan pertumbuhan yang diharapkan dapat berguna untuk mendukung perencanaan jangka menengah dan strategi promosi pekerjaan lainnya. Laporan juga menegaskan hasil yang diperoleh akibat kinerja pertumbuhan yang kuat belakangan ini. Laporan juga menganalisis keberlanjutan dan kesetaraan dengan melihat tren lingkungan, sosial dan ekonomi dalam pasar tenaga kerja.



Tren ketenagakerjaan dan sosial di 2012: Upaya untuk menciptakan ekonomi yang adil dan berkelanjutan

ISBN: 978-92-2-127437-7

Edisi kelima dari Tren Ketenagakerjaan dan Sosial di Indonesia menganalisis kemajuan dalam mencapai tujuan pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Isu utama di sini adalah memastikan bahwa ketenagakerjaan dapat dipertahankan untuk jangka pendek, menengah maupun panjang – yang terkait erat dengan pemanfaatan lingkungan dan kelayakan pekerjaan.



Trade and employment: country report for Indonesia*

ISBN: 978-92-2-127811-5

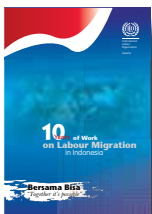
Laporan ini bertujuan mengkaji dan menanggulangi dampak perdagangan terhadap ketenagakerjaan di Indonesia. Pentingnya laporan ini adalah mendukung analisis kebijakan perdagangan dan pasar tenaga kerja yang efektif dan koheren yang membahas mengenai tantangan yang harus dihadapi pekerja dan pengusaha dan memperluas kesempatan penciptaan pekerjaan yang layak di Indonesia.

* Hanya tersedia dalam Bahasa Inggris



Rencana strategis pariwisata berkelanjutan dan pekerjaan layak dan ramah lingkungan (*green jobs*) untuk Indonesia

Bagaimana pariwisata dapat berperan dalam memaknai kesejahteraan dan perbaikan kualitas hidup merupakan pertanyaan yang dicoba dijawab dalam Rencana Strategis Pariwisata Berkelanjutan dan Pekerjaan yang Layak Lingkungan ini, yang digagas oleh ILO bersama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan ditempatkan dalam payung Proyek ILO tentang Pekerjaan Layak yang Ramah Lingkungan di Asia, untuk Indonesia (2010-2015).



10 tahun menangani migrasi kerja di Indonesia

Publikasi ini menyoroti dukungan dan aksi yang dilakukan ILO terkait migrasi kerja di negara ini, beragam dari pembuatan kebijakan, pembangunan kapasitas hingga pemberdayaan pekerja migran dan peningkatan kesadaran.



20 tahun menanggulangi pekerja anak di Indonesia

Publikasi ini memuat kemajuan-kemajuan dan aksi-aksi penting yang dilakukan ILO bersama para mitranya, dari lembaga pemerintah, serikat pekerja, organisasi pengusaha, lembaga swadaya masyarakat (LSM) hingga akademisi dan para pemangku kepentingan lainnya, dalam menanggulangi pekerja anak di Indonesia sejak tahun 1992. Publikasi ini pun menyoroti kemajuan-kemajuan yang dicapai, komitmen-komitmen yang ditetapkan, tantangan-tantangan yang dihadapi dan langkah-langkah selanjutnya untuk memastikan masa depan tanpa pekerja anak di Indonesia.



10 tahun menangani lapangan kerja bagi kaum muda di Indonesia

ILO dan para mitranya telah bekerjasama membantu kaum muda Indonesia dalam mempersiapkan diri memasuki dunia pekerjaan. Berikut ini adalah kisah tentang apa yang telah dilakukan ILO bersama pemerintah, pengusaha, serikat pekerja/buruh dan lembaga donor.

Tersedia melalui www.ilo.org/jakarta

Kegiatan Utama

- Lokakarya Nasional mengenai “Mempromosikan akses perempuan terhadap pekerjaan yang layak dan kesetaraan kerja di Indonesia”, Jakarta, 16 Januari
- Lokakarya Regional Kerjasama Selatan-Selatan dalam Memerangi Pekerja Anak, Jakarta, 4 Maret
- Peluncuran Tren Ketenagakerjaan dan Sosial di Indonesia 2012: Upaya untuk menciptakan ekonomi yang adil dan berkelanjutan, Jakarta, 4 April
- Temu Media mengenai “Manajemen Kelangsungan Usaha yang Mampu Menghadapi Berbagai Bencana”, Jakarta, 15 April
- Seminar ILO/Bank Indonesia, “Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui Inklusi Keuangan yang Bertanggungjawab dan Berkelanjutan”, Jakarta, 6-7 Mei
- Peluncuran Laporan Terbaru, “10 Tahun Menangani Migrasi Kerja di Indonesia”, Jakarta, 8 Mei
- Peringatan Hari Dunia Menentang Pekerja Anak berjudul “Katakan Tidak pada Pekerja Rumah Tangga Anak”, Jakarta, Sukabumi, Surabaya dan Makassar, 12 Juni
- Pertunjukan Teater Pekerja Rumah Tangga Anak, “Mutiara Retak Dibalik Kain Pel,” Jakarta, 18 Juni
- Forum ASEAN tentang Ketenagakerjaan Muda, Semarang, 13 Mei
- Peluncuran Publikasi Terbaru, “Perdagangan dan Ketenagakerjaan: Laporan untuk Indonesia”, Jakarta, 4 Juli
- Seminar tentang Pekerjaan Layak untuk Ketahanan Pangan, Kupang, 9-11 September
- Lokakarya Regional tentang Pekerjaan di Sektor Perikanan: Meningkatkan Pemahaman dan Berbagi Praktik-praktik yang Baik untuk Melindungi Pekerja Migran, Makassar, 12-13 September

- Pertemuan Tingkat Tinggi mengenai Tantangan yang Dihadapi Pengusaha Menghadapi Integrasi ASEAN pada 2015, Bali, 7-8 November

- Forum Ketenagakerjaan Indonesia, Surabaya, 13-14 November

- Lokakarya Nasional mengenai Keterkaitan REDD + terhadap Pekerjaan: Pekerjaan Berwawasan Ramah Lingkungan, Jakarta, 28 November

- Serangkaian Peluncuran Video Disabilitas, SAMA – Ruang, Peluang dan Perlakuan bagi Penyandang Disabilitas, Jakarta, Surabaya, Yogyakarta and Semarang, 5, 9, 11 and 17 Desember

- Peluncuran Tren Ketenagakerjaan dan Sosial di Indonesia 2013: Memperkuat peran pekerjaan layak dalam kesetaraan pertumbuhan, Jakarta, 17 Desember

- Temu Media mengenai Catatan Akhir Tahun Migrasi Kerja 2013: Indonesia Mendesak Finalisasi Instrumen ASEAN untuk Melindungi Pekerja Migran, Jakarta, 18 Desember